



SKRIPSI

**PERAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANTAENG**
(Studi kasus di SMPN Kab. Bantaeng)

NUR HAJAR

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2018**



**PERAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANTAENG**
(Studi di SMPN Kab. Bantaeng)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Program Studi Administrasi Pendidikan Strata Satu
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

Oleh

NUR HAJAR
1343040014

JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2018



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bantaeng”.

Atas Nama:

Nama : Nur Hajar
NIM : 1343040014
Jurusan : ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Fakultas : ILMU PENDIDIKAN

Skripsi ini diujikan dan dipertahankan di depan panitia ujian pada hari kamis, 25 Januari 2018 dinyatakan LULUS

Makassar, Januari 2018

Pembimbing I,

Drs. M. Bachtiar, M.Si
NIP. 19561231 198503 1 014

Pembimbing II,

Dra. Sitti Habibah, M.Si
NIP. 19621220 198903 2 001

Disahkan :

Dekan, Jurusan AP FIP UNM,



Dr. H. Ansar, M.Si
NIP. 19690729 200312 1 004



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI






Skripsi telah diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar dengan SK Dekan No : 132/UN36.11/EP/2018 dan telah diujikan pada hari Kamis, 25 Januari 2018 sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Administrasi Pendidikan serta telah dinyatakan LULUS.

Disahkan oleh
Dekan FIP UNM

Dr. Abdullah Siring, M.Pd
NIP: 19620303 198803 1 003

Panitia Ujian :

1. Ketua : Dr. Pattaufi, M.Si
2. Sekretaris : Dr. Ansar, M.Si
3. Pembimbing I : Drs. M. Bachtiar, M.Si
4. Pembimbing II : Dra. Sitti Habibah, M.Si
5. Penguji I : Dr. Wahira, M. Pd
6. Penguji II : Dr. Rudi Amir, M.Pd


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Nur Hajar

NIM : 1343040014

Jurusan/Program Studi : Administrasi Pendidikan

Judul Skripsi : Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bantaeng (studi kasus di SMPN 1 Bantaeng, SMPN 1 Pa'jukukang, SMPN 1 Tompobulu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri . Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan atau mengandung unsur plagiat maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 27 Desember 2017

Yang Membuat Pernyataan

Nur Hajar
Nim.1343040014

MOTTO

Tidak ada yang tidak bisa, yang ada mau atau tidak mau

(Nur Hajar, 2018)

Kuperuntukkan karya ini sebagai Ungkapan terima kasih kepada yang mulia kedua orang tuaku, saudaraku dan keluarga besar yang selalu memberi motivasi dan mendukung setiap ayunan langkahku.

Terima kasih.

ABSTRAK

NUR HAJAR, 2018. Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Skripsi, dibimbing oleh, Drs.M. Bachtiar, M.Si, dan Dra.St. Habibah, M.Si. Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini mengkaji tentang peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan jenis kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah 9 Orang, yang terdiri dari berbagai sumber (Ketua Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Ketua DPRD Komisi A Bidang Pendidikan). Analisis data dilakukan dengan interaktif dan dilakukan secara terus menerus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng masih banyak kekurangan, kemudian Peran Dewan Pendidikan menunjukkan belum berjalan dengan baik, dibuktikan bahwa Peran Dewan Pendidikan sebagai badan pertimbangan, sebagai Pendukung, sebagai pengontrol dan sebagai mediator tidak berjalan maksimal. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng belum maksimal dijalankan.

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pencipta alam semesta atas limpahan Rahmat, Karunia dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Setiap nikmat waktu, pikiran dan tenaga yang tiada terukur yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dari waktu yang telah di targetkan sebelumnya. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Sebagai seorang hamba yang berkemampuan terbatas dan tidak lepas dari dosa, tidak sedikit kendala yang dialami oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. Berkat pertolongan Allah SWT dan berbagai pihak yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil serta motivasinya langsung maupun tidak langsung sehingga kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda saya Drs. Bohari dan Ibunda Dra. Mardiah serta kakakku atas segala doa, cinta, kasih sayang, didikan kepercayaan dan pengorbanan untuk Penulis. Tak lupa pula penulis memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Drs. M. Bachtiar, M.Si selaku Pembimbing I dan Dra. St. Habibah, M.Si. selaku pembimbing II, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sepanjang hidupnya, Amin.

Demikian pula segala bantuan yang penulis peroleh dari segenap pihak selama di bangku perkuliahan sehingga penulis merasa sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Husain Syam, M.Tp selaku Rektor Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi yang dipimpin yaitu Universitas Negeri Makassar.
2. Dr. Abdullah Sinring, M.Pd. selaku Dekan FIP UNM yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan yang dipimpinnya.
3. Dr. Abdul Saman, M.Si, Kons (PD I), Drs. Muslimin, M.Ed (PD II), Dr. Pattaufi, M.Si (PD III) dan Dr. Parwoto, M.Pd (PD IV) yang telah memberikan layanan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan.
4. Dr. H. Ansar, M.Si selaku ketua jurusan, Dra. Sitti. Habibah, M.Si selaku sekretaris jurusan dan Dr. Ed. Faridah, S.T., M.Sc, selaku ketua Lab Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar yang telah banyak membimbing dan memberikan banyak ilmu dan masukan bagi penulis.
5. Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar yang telah banyak memberikan ilmu yang berguna bagi penulis.
6. H. Ahmad Karim selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng yang telah memberikan izin dan menerima penulis untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut.

7. Nurhasanah, yang selalu setia menemani dan memberi motivasi serta selalu setia mendengarkan keluh kesah yang di alami oleh penulis selama penyusunan karya ini.
8. Keluarga besar Administrasi Pendidikan Angkatan 2013 yang memberi motivasi dan berjuang bersama-sama selama menjalani pendidikan. Terimakasih telah menemani penulis dengan menjadi sahabat dan saudara terbaik.
9. Teman-teman Posko KKN-PPL Terpadu angkatan XIV UPTD Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kec. Pamboang yang senantiasa mendukung penulis.
10. Teman-teman UKM LKIMB UNM yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan kepada penulis.
11. Kader IMM UNM yang senantiasa memberikan motivasi, memberikan ilmu dan bantuan secara moril, serta membantu penulis selama penelitian berlangsung.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERUNTUKAN	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP	11
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Dasar Pembentukan Dewan Pendidikan	11
2. Pengertian Dewan Pendidikan	13
3. Tugas dan Fungsi Dewan Pendidikan	14
4. Peran Dewan Pendidikan	16

a. Pemberi Pertimbangan	19
b. Pendukung	20
c. Pengontrol	21
d. Mediator	22
5. Hubungan Koordinatif Dewan Pendidika	24
6. Larangan	25
7. Kepengawasan	25
8. Mutu Pendidikan	25
B. Kerangka Konsep	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Kehadiran Peneliti	30
C. Deskripsi Lokasi Penelitian	31
D. Sumber Data	32
E. Prosedur Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	36
H. Tahap-Tahap Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng	47
1. Sejarah Singkat Dewan Pendidikan	47
2. Keadaan Sekretariat Dewan Pendidikan	47

3. Struktur Organisasi Dewan Pendidikan	49
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	86
RIWAYAT HIDUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Indikator Dewan Pendidikan	15
1.2	Tabel Kerangka Konsep	37
1.3	Struktur Organisasi Dewan Pendidikan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1	Hubungan koordinatif Dewan Pendidikan	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	87
2.	Instrumen Wawancara	88
3.	Lampiran Wawancara dengan Informan	95
4.	Dokumentasi	103
5.	Persuratan	106
6.	Riwayat Hidup	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberadaan manusia merupakan bagian dari yang disebut pendidikan, dimana prosesnya menunjukkan gerak belajar membelajarkan sesama makhluk. Menurut Suhartono Suparlan (2011), Untuk mencapai tujuan pendidikan (jalan lurus menuju kehidupan) yang telah dicita-citakan seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar alinea ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan ini diejawantahkan dalam aturan tersrstruktur oleh pemerintah.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. (UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 1 ayat 1).

Pendidikan secara kolektif menurut Maisah (2013) dipandang secara luas yaitu terbagi atas tiga rana, yaitu pendidikan formal, informal dan nonformal, dimana ketiga lini ini sangat berperan penting dalam memberi sumbangsi peningkatan kualitas manusia dalam kehidupannya. Seperti halnya sebuah pohon, pendidikan merupan pohon utuh yang akan menghasilkan buah sebagai manfaat, yang kemudian dimanfaatkan untuk kehidupan. Esensi pendidikan kini mulai pudar oleh yang begitu kompleks sehingga melupakan esensi yang sebenarnya.

Kesadaran pendidikan setiap manusia harus dimiliki dengan usaha yang beragam dari masing-masing lini, seperti orang tua yang menjadi pondasi awal pendidikan, kemudian sekolah menjadi pusat kebudayaan, dan masyarakat menjadi media untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh. Masyarakat seperti orang tua mempunyai tipe yang beragam dalam menanggapi persoalan pendidikan, ada yang menyerahkan anaknya kepada sekolah dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada sekolah, tanpa peduli peran pembentukan karakter lewat lingkungan keluarga.

Pendidikan bukan hanya sekedar untuk dapat membaca dan menulis seperti yang diungkapkan oleh Paulo Priere (2014) dalam buku politik pendidikan, tetapi lebih jauh untuk membentuk mental dan spritual seseorang agar memiliki kecerdasan dan keahlian sebagai bekal hidup dimasa yang akan datang serta dapat memberikan peran bagi pembangunan bangsa.

Pendidikan formal (persekolahan) yang mempunyai sistem terencana dalam pelaksanaannya terus berinovasi dalam strategi pelaksanaan untuk perbaikan sekolah atau satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Anwar (2013) Sekolah yang unggul adalah sekolah yang menunjukkan tingkat keefektifan tinggi, dalam artian sekolah yang dalam mencapai visi, misi, serta tujuannya diwujudkan dalam aktifitas sekolah yang efektif dengan daya dukung ini salah satunya ditunjukkan dari performa kerja kepala sekolah yang mampu mengelola sumber daya manusianya serta performa kerja dari seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja secara profesional.

Dewasa ini kemudian muncul inovasi pendidikan yang disebut sebagai desentralisasi pendidikan, menurut Irianto Yoyon Bahtiar (2011) yang dimana otonomi kebijakan sekolah diberikan langsung tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengelola sekolah masing-masing sesuai kearifan lokal yang dimiliki.

Sekolah merupakan pusat salah satu unit yang sangat urgen keberadaannya dan tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, menurut Arikunto (2014), sekolah dibuat untuk kepentingan masyarakat sebab sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang mana mampu melahirkan insan sejati, yang mampu menjawab tantangan global, berperilaku lokal, dan bersifat nasional. Oleh sebab itu, program-program yang ada di sekolah harus dijalankan efektif dan efisien. Selain tuntutan global dan nasional, sekolah juga dihadapkan pada berbagai macam tuntutan lokal, sehingga kepedulian masyarakat terhadap pengembangan sekolah yang efektif menjadi signifikan. Sehubungan dengan itu, yang harus dilakukan adalah bagaimana sekolah mampu menjalin hubungan yang harmonis dan bersifat resiprokal dengan komite sekolah dan masyarakat sekitar.

Tanggung jawab pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat sehingga diharapkan terwujudnya kualitas pendidikan yang lebih baik dan bermutu. Sejalan dengan hal tersebut tanggung jawab masyarakat dalam dunia pendidikan dapat diwujudkan dan diwadahi oleh suatu badan atau lembaga yang disebut dengan Dewan Pendidikan. Hal ini terlihat jelas dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20/2003 pasal 1 ayat 24 dan 25 yang menyatakan “Dewan Pendidikan

adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan (pasal 1 ayat 24)”

Era otonomi daerah, khususnya dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan seperti yang dikemukakan diatas partisipasi masyarakat pada tingkat sekolah diwadahi dalam komite sekolah dan tingkat kabupaten diwadahi oleh Dewan Pendidikan dalam format manajemen berbasis sekolah, dan pada tingkat Kabupaten dan propinsi diwadahi oleh Dewan Pendidikan (Kepmendiknas No. 044/U/2002).

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan dengan melakukan penguatan partisipasi masyarakat, hal ini merupakan bentuk realisasi dari demokrasi berkeadilan. Penguatan partisipasi masyarakat ini dilakukan dengan cara mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan penggalian potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Seperti yang diungkapkan oleh Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi dalam buku Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah bahwa:

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak (keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri) untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam meningkatkan mutu dan efektivitas pendidikannya. Partisipasi masyarakat tidak seharusnya hanya dalam bentuk dana, melainkan juga sumbangan pemikiran dan tenaga. (Jalal & Supriyadi, 2001 : 99)

Meningkatkan mutu pendidikan pemerintah daerah mengusahakan agar keberadaan Dewan Pendidikan bisa mensinergikan gerakan bersama dengan komite

sekolah dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan yang ada di daerah tersebut. Terlepas dari keberadaan Dewan Pendidikan sebagai badan mandiri, harapan dari terbentuknya Dewan Pendidikan dapat bergotong royong bersama Komite Sekolah untuk melihat bagaimana potensi satuan pendidikan yang selanjutnya akan dievaluasi. Dewan Pendidikan bukan hanya fokus kepada program sekolah namun, harus bisa lihai dalam melihat keberadaan dan potensi masyarakat pula, kemudian Dewan Pendidikan dapat menjadi penyambung lidah untuk mensuarakan pendapat dan aspirasi dari masyarakat yang berada dalam lingkup Dewan Pendidikan Kompri (2014).

Keberadaan Dewan Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional pada awalnya menimbulkan pro dan kontra, sesuai yang diungkapkan oleh Kompri (2014) yang pro menganggap bahwa keberadaan Dewan Pendidikan dibutuhkan hal ini didasarkan kepada fakta bahwa keberadaan Dewan Pendidikan dapat menjadi mitra dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan sekolah, tetapi bagi yang kontra menganggap keberadaan Dewan Pendidikan dikhawatirkan menjadi beban dan hanya sebagai alat untuk melancarkan kebutuhan sekolah.

Terlepas dari dua pendapat diatas, dalam kesempatan ini peneliti akan menggaris bawahi dan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Pendidikan dalam konteks perannya terhadap Meningkatkan mutu pendidikan SMPN pada Kabupaten/Kota.

Sekolah dan masyarakat harus lebih dekat, dengan tantangan multikultural Indonesia, sekolah harus mampu menyusun program yang bisa menjawab tantangan

kearifan lokal suatu daerah Hasbullah (2010). Meningkatkan mutu pendidikan tentu harus didukung oleh sistem yang saling menguatkan salah satunya masyarakat sebagai referensi satuan pendidikan disuatu daerah dalam mengembangkan sekolah untuk pembelajaran yang lebih efektif.

Dewan Pendidikan di Kabupaten harus mampu menempatkan diri untuk mengimplementasikan peran, tentu untuk melihat sejauh mana peran yang diberikan. Aplikasi peran Dewan pendidikan merupakan bentuk Meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan.

Perbedaan antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah hanya terletak pada ruang lingkup kerjanya saja, menurut Juni Priansa (2014) Dewan Pendidikan bersifat makro berkedudukan di provinsi/kabupaten/kota, sedangkan Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan/sekolah/madrasah. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah lembaga mandiri, tidak memiliki hubungan hirarkis dengan pemerintah daerah maupun pusat. Hubungan kerja antara Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan lembaga pemerintah adalah bersifat koordinatif.

Melihat peran Dewan Pendidikan tentu tidak mengherankan apabila masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap keberadaannya. Terlebih selama ini masyarakat merasa kesulitan untuk mengartikulasikan kepentingan dalam bidang pendidikan kepada pihak sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu pembentukan Dewan Pendidikan dianggap sebagai solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, harapan tersebut seakan tercederai oleh beberapa kasus yang membuat kredibilitas Dewan Pendidikan menjadi lemah. Di luar

Daerah Kabupaten Bantaeng ditemukan bahwa kiprah Dewan Pendidikan mengundang beragam kritikan, diantaranya lembaga ini dianggap terlalu banyak ikut campur urusan proses belajar-mengajar, melakukan pemungutan biaya yang besar kepada orang tua siswa, biaya sekolah menjadi tinggi karena harus membiayai operasional Komite Sekolah dan pemungutan berjalan tanpa melalui perundingan dan tidak melihat kemampuan setiap orangtua siswa. Suara pembaharuan (dalam Tamirin dkk, 2009: 3).

Secara kuantitatif, Dewan Pendidikan kabupaten/kota baik negeri maupun swasta memang telah terbentuk hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Namun belum sepenuhnya keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/madrasah dapat mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan. Salah satu faktor penyebabnya antara lain karena masih kurangnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan (*stakeholder*) tentang kedudukan, fungsi dan tugas Dewan Pendidikan.

Peran Dewan Pendidikan sesuai amanat kepmendiknas No. 044/U/2002. Hemat peneliti akan membatasi dan menfokuskan pada peran yang ke empat yaitu sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan penghubung, kenapa peneliti memilih peran Dewan Pendidikan karena dengan alasan bahwa peneliti ingin mengetahui secara mendalam bagaimana sebenarnya keterlibatan, peran Dewan Pendidikan dalam melaksanakan amanat sebagai lembaga mandiri, yang dimandir karena desentralisasi pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan wawancara awal dengan ketua Dewan Pendidikan bahwa peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng sejauh ini telah berjalan lama, dan mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya tugas dan tanggung jawab yang diberikan, seiring dengan berjalannya waktu Dewan Pendidikan semakin hari semakin redup perannya, berdasarkan wawancara awal dengan pihak dinas Pendidikan (Kasi Kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMP) bahwa, “Dewan Pendidikan sudah lama tidak berkoordinasi dengan kami di Dinas, ini karena Dewan Pendidikan tidak mengupgrade pengurus-pengurusnya, kami akui pun jarang berkomunikasi maupun meminta saran”. Berdasarkan observasi awal maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut.

Penelitian ini mengkaji tentang peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Peneliti membatasi penelitian dengan studi kasus yang dilakukan di SMPN 1 Bantaeng, SMPN 1 Pa’jukukang, dan SMPN 1 Tompobulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng.

Sehubungan dengan permasalahan yang dipaparkan diatas, cukup menjadikan alasan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian ini yang mencoba mengkaji lebih dalam secara empirik dan ilmiah dengan mengambil judul **peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng.** (studi kasus pada SMPN 1 Bantaeng, SMPN 1 Pa’jukukang, SMPN 1 Tompobulu)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah gambaran peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng ? meliputi :

- a. Dewan Pendidikan sebagai badan pertimbangan
- b. Dewan Pendidikan sebagai pendukung
- c. Dewan Pendidikan sebagai pengontrol
- d. Dewan Pendidikan sebagai mediator

C. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya tujuan dari suatu penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

untuk mengetahui peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng, meliputi :

- e. Dewan Pendidikan sebagai badan pertimbangan
- f. Dewan Pendidikan sebagai pendukung
- g. Dewan Pendidikan sebagai pengontrol
- h. Dewan Pendidikan sebagai mediator

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau peran dalam:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu administrasi pendidikan terutama yang berkaitan dengan studi Dewan Pendidikan, serta menjadi bahan masukan informasi bagi penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan untuk Dewan Pendidikan
- b. Sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Dasar Pembentukan Dewan Pendidikan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga oleh Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional yang programnya adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Salah satu program pendidikan menengah adalah:

terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/madrasah (*school based management*) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Pendidikan di setiap Kabupaten/Kota serta pemberdayaan atau pembentukan komite sekolah di seluruh SD dan MI serta SMP dan MTs.

Keberadaan Dewan Pendidikan dalam Propenas (Program Pembangunan Nasional) tersebut mencul karena mendapatkan persetujuan dari komisi IX DPR yang membidangi pendidikan, persetujuan tersebut diperoleh setelah Agus Raharjo, Direktur Agama dan Pendidikan Bappenas memberikan presentase tentang Dewan Pendidikan

Setelah persetujuan Dewan Pendidikan tersebut, akhirnya Dewan Pendidikan memperoleh tempat dan kerangka jaring pengaman sosial (JIPS) dengan menggunakan konsep “pemberdayaan/peningkatan peran” Uji publik tentang Dewan Pendidikan melalui JPS (jaring pengaman sosial) memperoleh dukungan positif dari masyarakat sebagai berikut:

- (1) Pertama, mengubah nama dewan sekolah menjadi Dewan Pendidikan;
- (2) Kedua, merekomendasikan perlunya segera diterbitkan regulasi tentang pembentukan Dewan Pendidikan;

Dukungan itulah yang akhirnya telah melahirkan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam kepmendiknas Nomor 044/U/2002 ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional itulah yang mengamankan terbentuknya Dewan Pendidikan, pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian dijabarkan ke dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang sebenarnya terbit terlambat selama tujuh tahun. Namun proses pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan Provinsi terus berjalan. Sekretariat direktorat jenderal pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan dana kepada tim fasilitasi pembentukan Dewan Pendidikan provinsi kepada dinas pendidikan provinsi. Sampai saat ini, seluruh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk daerah Kabupaten pemekaran telah terbentuk Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Tinggal

delapan provinsi yang belum membentuk Dewan Pendidikan provinsi. Bahkan seluruh sekolah baik negeri maupun swasta telah terbentuk komite sekolah/madrasah.

2. Pengertian Dewan Pendidikan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2001) disebutkan bahwa Dewan Pendidikan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan satu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding.

Dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002

Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, seperti Dewan Pendidikan, majelis pendidikan, atau nama lain yang disepakati.

Dewan Pendidikan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dewan Pendidikan yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakan serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi daerah setempat.

Sebagaimana yang tertuang dalam SK Mendiknas No. 044/U/2002, Dewan Pendidikan ini bersifat generik, yang maksudnya bahwa nama badan atau organisasi tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota, dalam salah satu satuan lembaga pendidikan bisa saja Dewan Pendidikan dibuat dengan nama majelis pendidikan, , majelis madrasah dan lain sebagainya, namun

yang terpenting adalah bahwa terbentuknya organisasi yang secara tidak langsung akan meleburkan keberadaan badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) sebagaimana yang tertuang dalam SK Mendiknas No. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan ini sesuai dengan kebutuhan dan aturan serta acuan yang berlaku.

Dewan Pendidikan merupakan satuan badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada Kabupaten/Kota sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap tingkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut Dewan Pendidikan harus berperan aktif dan progresif dalam menyelesaikan masalah pendidikan pada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada pada daerah Kabupaten/Kota.

3. Tugas dan Fungsi Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati/waliKota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Kemudian dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, fungsi Dewan Pendidikan adalah sebagai pemberi pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Fungsi tersebut dijalankan Dewan Pendidikan secara mandiri dan profesional.

Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Priansa (2014: 31) mengemukakan bahwa “Indikator Dewan Pendidikan perlu diberdayakan melalui proses revitalisasi, baik organisasinya, kebijakan, program, dan kegiatannya, sehingga lembaga mandiri ini benar-benar dapat berfungsi dengan baik” sebagaimana telah diamanatkan Rencana Strategis Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel berikut ini memuat indikator yang dapat dijadikan rujukan untuk menilai Dewan Pendidikan.

No.	Fungsi	Indikator
1.	Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu	1. Memiliki AD/ART Dewan Pendidikan
		2. Menyusun program kerja Dewan Pendidikan
		3. Menjalin komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan
		4. Menyusun rencana, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2.	Melakukan kerja sama dengan masyarakat (institusi terkait)	5. Melaksanakan kerjasama (MOU) dengan institusi terkait
		6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama (MOU)
3.	Menampung dan menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan dari masyarakat.	7. Melaksanakan kegiatan pendataan, survei, pemetaan masalah pendidikan, studi, kajian, seminar, dan sebagainya, serta mengumumkan kepada masyarakat
		8. Melaksanakan inventarisasi aspirasi, ide, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat tentang pendidikan.
4.	Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah dan sekolah tentang <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan program pendidikan b. Kriteria kinerja daerah dan sekolah c. Kriteria tenaga kependidikan 	9. Memberikan rekomendasi secara periodik, terutama secara tertulis, kepada pemerintah dan sekolah
		10. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut dan meminta klarifikasi kepada pemerintah dan sekolah tentang rekomendasi yang belum dilaksanakan
		11. Menyusun berbagai kriteria, standar, norma, dan panduan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di

	d. Kriteria fasilitas pendidikan e. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan	daerah dan sekolah 12. Memberikan andil yang besar dan aktif dalam proses penyusunan peraturan daerah pendidikan
5	Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	13. Menyusun program-program inovatif yang secara langsung memiliki dampak mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan 14. Mengevaluasi pelaksanaan program-program inovatif tersebut secara berkelanjutan
6	Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan	15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan 16. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil kegiatan pengawasan 17. Menyampaikan laporan kegiatan dan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait

Tabel 1.1 Indikator Dewan Pendidikan. Sumber Dirjen Dikdasmen Depdiknas 2007 (Priansa. 2014:31-32)

4. Peran Dewan Pendidikan

Dijelaskan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan

bahwa peran Dewan Pendidikan adalah sebagai:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
- 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (*legislatif*) dengan masyarakat

Peran tersebut selanjutnya diperinci melalui fungsi Dewan Pendidikan yang dijelaskan pada enam pion sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- 4) Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai
 - a) Kebijakan dan program pendidikan
 - b) Kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
 - c) Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - d) Kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - e) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- 5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Melalui peran dan fungsi inilah Dewan Pendidikan melakukan perumusan program, kebijakan, dan kegiatan yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya berdasarkan peran dan fungsi Dewan Pendidikan inilah yang akan dijadikan indikator dalam pembuatan instrumen penelitian. Sebagai indikator peran Dewan Pendidikan yang akan dipersepsi oleh publik adalah indikator peran yang sudah tertera dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 yang telah diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

Berikut adalah pengelompokan fungsi dan peran Dewan Pendidikan ke dalam aspek Peran Dewan Pendidikan yang dilakukan oleh Iwan Panji Winata (2016: 47) :

- 1) Badan Pertimbangan (*advisory agency*)

- a) Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
 - b) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi mengenai kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan, guru/tutor dan kepala satuan pendidikan.
 - c) Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi mengenai kriteria fasilitas pendidikan.
 - d) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 2) Badan Pendukung (*supporting agency*)
- a) Memberi dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
 - b) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
 - c) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 3) Badan Pengontrol (*controlling agency*)
- a) Pengontrol dalam rangka transparansi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
 - b) Pengontrol dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan
 - c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- 4) Penghubung (*mediator agency*)
- a) Memberikan mediasi antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.
 - b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Setelah dilakukan pengelompokan fungsi ke dalam aspek peran, selanjutnya peneliti mengkonsultasikan pengelompokan indikator tersebut kepada Dewan Pendidikan dan selanjutnya dijadikan butir instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data.

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 dinyatakan bahwa peran Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Pemberi pertimbangan

Dewan Pendidikan berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisor agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten/Kota. Untuk menjalankan peran tersebut, Dewan Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

(1)kebijakan dan program pendidikan, (2) rencana dan anggaran pendidikan dan belanja sekolah, (3) kriteria kinerja Kabupaten/Kota, (4) kriteria tenaga kependidikan, (5) kriteria fasilitas pendidikan, dan (6) hal lain yang terkait dengan pendidikan. (Kepmendiknas 044/U/2002)

Menurut (Kompri: 2014) Dewan Pendidikan sebagai pemberi pertimbangan merupakan penjabaran dari tujuan pembentukan Dewan Pendidikan itu sendiri, karena penentuan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pendidikan diperoleh dari dan untuk masyarakat yang sudah tertuang dalam tujuan pembentukan Dewan Pendidikan. Peran Dewan Pendidikan sebagai pendukung usaha-usaha sekolah/madrasah, khususnya yang berkaitan dengan masalah pendanaan atau financial sekolah atau sekolah demi berlangsungnya pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat setempat. Istilah mendukung pada peran Dewan Pendidikan ini maksudnya bahwa Dewan Pendidikan tidak hanya menggalang dana dari masyarakat/ orang tua/wali murid saja, melainkan Dewan Pendidikan harus aktif mencari sumber dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pendidikan, baik melalui usaha produktif, donatur, simpatisan dan lain sebagainya, sehingga hal ini akan meringankan beban dan tanggung jawab wali murid dalam membantu pembiayaan pendidikan pada sekolah tempat anaknya menimba ilmu pengetahuan. Penggalangan

dana atau pembiayaan pendidikan yang diperoleh dari donatur, usaha produktif, dan para simpatisan merupakan jawaban yang paling tepat dalam mengatasi problema dalam meningkatkan mutu pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

Sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya sekolah-sekolah yang berkualitas. Karena kualitas menjadi barameter, maka usaha untuk meningkatkan kualitas dan perceaptan harus dilakukan secara konsisten.

b. Pendukung

Menurut Purwanto (1998) pendukung adalah kesedian atau kecendrungan seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu, apabila kelompok tersebut mendapat rangsangan. Sikap pendukung dapat terjadi pada situasi tertentu, orang, kelompok, nilai-nilai terjadi di sekitar manusia.

Bentuk dukungan Dewan Pendidikan dapat berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Peran Dewan Pendidikan sebagai pendukung dijabarkan ke dalam fungsi Dewan Pendidikan sebagai berikut:

(1)mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, (2) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, (3) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002).

Sebagai pendukung Dewan Pendidikan harus benar-benar memantau kondisi yang harus dibenahi di sekolah tersebut. Melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait maka akan mendapatkan gambaran untuk mengatasi hal-hal tersebut, sebab ini penting karena akan memberikan perubahan terhadap sekolah tersebut.

c. Pengontrol

Pengontrol adalah penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Tujuan pengontrolan adalah fungsi pengawasan dan pengendalian performa untuk memastikan bahwa jalannya suatu pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Peran Dewan Pendidikan sebagai pengontrol, dapat dikembangkan bahwa keberadaan Dewan Pendidikan akan terciptanya situasi yang transparan dan akuntabel antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penggunaan pembiayaan pendidikan. Kebijakan dan hasil dari usaha yang telah dilakukan Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam membantu pembiayaan pendidikan pada sekolah tersebut tidak hanya diserahkan sepenuhnya oleh pihak pengelola pendidikan, namun pelaksanaan kebijakan dan penggunaan pembiayaan tersebut tidak lepas dari kontrol Dewan Pendidikan, sehingga terhindarnya penyalahgunaan kebijakan dan pembiayaan pendidikan pada sekolah tersebut. (Kompri: 2014)

Siagian (2000) mendefinisikan pengawasan/kontrol sebagai keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik, dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin.

Dewan Pendidikan berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Kabupaten/Kota. Untuk menjalankan peran tersebut Dewan Pendidikan memiliki fungsi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

d. Mediator

Menurut Priansa (2014) “mediasi adalah menjembatani antara fungsi konservatif dan fungsi progresif yaitu sekolah sebagai lembaga yang mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat. Sekolah harus mampu menjadi pengaruh dari masyarakat yang ada menjadi masyarakat yang lebih maju”.

Peran Dewan Pendidikan sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas hanyalah merupakan acuan dasar saja, karena Dewan Pendidikan pada dasarnya lebih berhak memperluas perannya dengan tidak hanya sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, melainkan Dewan Pendidikan juga dapat menjadi mediator antara pihak sekolah dengan masyarakat, donatur, pengusaha dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian sumber dana Dewan Pendidikan tidak hanya diperoleh dari pemerintah yang anggarannya tidak akan pernah mencukupi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu

pendidikan secara menyeluruh. Konsep atau acuan sebagai mediator di atas lebih mengarah pada permasalahan formal antara masyarakat dan pemerintah, contohnya masalah pencairan dana dari pemerintah dan lain sebagainya. (Kompri: 2014)

Dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 disebutkan bahwa Dewan Pendidikan berperan sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di Kabupaten/Kota. Peran sebagai mediator dijabarkan kedalam fungsi Dewan Pendidikan sebagai berikut: melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisis ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat. Dewan Pendidikan sesuai peran dan fungsinya melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

- (1) Dewan Pendidikan menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program kerja.
- (2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai mediator Dewan Pendidikan harus memosisikan dirinya, yang mana Dewan Pendidikan adalah wadah dari aspirasi yang disalurkan oleh masyarakat dalam meningkatkan atau mengembangkan kualitas sekolah, karena tanpa adanya kerja kolektif maka apa yang di inginkan tidak akan pernah tercapai.

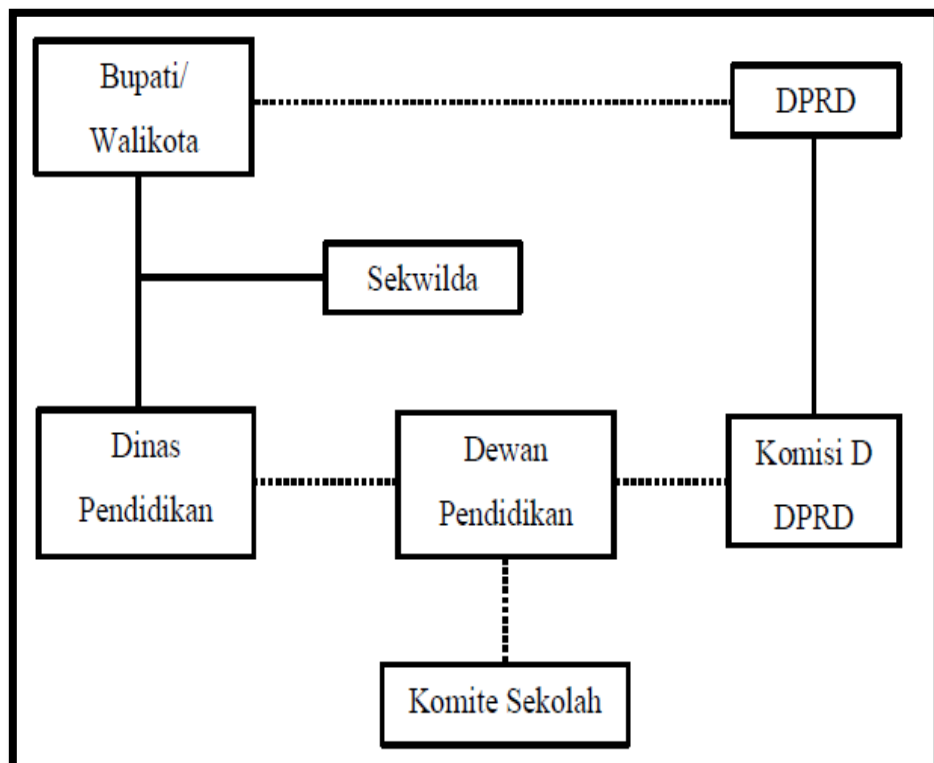
Peran Dewan Pendidikan yang maksimal maka akan menjadikan sekolah yang ramah di tengah-tengah masyarakat, sekolah yang berbudaya lokal, dengan kehadiran Dewan Pendidikan dapat menyambung lidah aspirasi masyarakat yang tak sampai ke

sekolah. Itulah mengapa Dewan Pendidikan dibentuk oleh pemerintah, diharapkan agar keberadaan Dewan Pendidikan dapat membawa perubahan pendidikan kearah yang lebih baik kedepannya.

5. Hubungan Koordinatif Dewan Pendidikan

Tata hubungan Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan serta Komite-Komite Sekolah adalah bersifat koordinatif.

Menurut Tim Dosen AP FIP UNY (2011: 27) model hubungan Dewan Pendidikan dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota dapat dilihat melalui gambar berikut ini.



Gambar 1.1 Model hubungan Dewan Pendidikan dengan Instansi-instansi Terkait di Kabupaten/Kota

6. Larangan

Pasal 198 PP nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan larangan kepada Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif dalam hal:

- 1) Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan
- 2) Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik secara langsung atau tidak langsung
- 3) Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung
- 4) Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- 5) Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

7. Kepengawasan

Secara umum, Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kedudukannya. Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada bupati/waliKota.

8. Mutu Pendidikan

Danim Sudarwan (2010) Mutu pendidikan sangat khas, karena pendidikan merupakan proses produksi yang menghasilkan layanan (*service producer*). Para pemakai produk pendidikanpun mempunyai dimensi yang khas pula, istilah pemakai perlu mendapat perhatian khusus, karena dalam dunia pendidikan produk pendidikan bukan barang, akan tetapi jasa yang pemakainya sangat beraneka ragam. Pemakai dalam dunia pendidikan dikategorikan pada pemakai internal dan eksternal. Pemakai

internal lebih penekanannya pada upaya melayani peserta didik dan guru-guru, sedangkan pemakai eksternal lebih diarahkan pada upaya melayani masyarakat dan pasar kerja. Lembaganya pun berupa *service producing institution*, tetapi juga *expectation* (harapan), *want* (keinginan) dan *need* (kebutuhan) pemakai turut menjadi ukuran. Dimensi-dimensi tersebut perlu diidentifikasi sebab mutu dalam pendidikan selalu berkaitan dengan upaya memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan semua pihak.

Studi mutu pendidikan dasar (SMPD) Balitbang Dikbud, mengartikan bahwa mutu itu sebagai kemampuan yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan dalam menanamkan kemampuan belajar seumur hidup bagi lulusannya (Ace Suryadi, 1987, 1989). Dari pengertian tersebut tugas dari satuan pendidikan adalah menanamkan kemampuan belajar dari orang perorangan yang ikut serta dalam suatu jenis dan jenjang pendidikan itu sendiri pada jalur pendidikan persekolahan. Kemampuan belajar ini merupakan konsep inti dari pendidikan dasar karena kebiasaan belajar seharusnya ditanamkan sejak dini. Dengan demikian peserta didik sebagai pemakai proses dan produk pendidikan, apabila menggunakan pendekatan sistem, kualitas pendidikan menunjuk pada proses dan produk.

Dilihat dari proses, pendidikan termasuk bermutu jika proses belajar mengajar menggambarkan hubungan antara peserta didik dengan berbagai bentuk sumber belajar secara bermakna yang ditunjang oleh sumberdaya yang layak, PBM yang bermutu ini pada gilirannya akan menentukan hasil belajar.

Esensi mutu adalah kemampuan belajar seumur hidup, kemampuan belajar ini adalah suatu kemampuan dari para lulusannya untuk melakukan kegiatan belajar secara terus menerus. Ciri khas belajar (menurut W.S. Winkel, 1983) ialah terjadi suatu perubahan yang bersifat kemajuan. Dalam konteks manajemen mutu terpadu disebut perbaikan yang berkesinambungan (continus improvement/Kaizen di Jepang). Perbaikan yang berkesinambungan berarti membuat yang terbaik lebih baik lagi. Artinya apakah suatu aktivitas dilaksanakan secara benar dan apakah suatu produk atau jasa adalah benar (benar menurut pandangan pemakai). Kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh lulusan pendidikan ialah kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan sehingga dapat menguasai setiap informasi baru dengan menggunakan cara-cara belajar yang telah dikuasainya. Dengan demikian fungsi sekolah tidak semata-mata menjadi penyampai informasi, akan tetapi menjadi penghubung peserta didik agar dapat menemukan dan mempelajari sumber untuk memperoleh satu persatu isi buku pelajaran, tetapi menjelaskan bagaimana cara mengetahui isi buku sebagai sumber belajar.

Berdasarkan esensi tersebut, maka mutu pendidikan disekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah baik teknis, maupun professional pengelolaan yang mendukung proses belajar mengajar peserta didik agar dapat mencapai prestasi belajar seoptimal mungkin. Agar sekolah dapat menghasilkan mutu hasil belajar yang tinggi, maka sekolah harus mampu menciptakan mutu pengajaran yang tinggi, sehingga peserta didik dapat belajar banyak, terarah, sistematis. Menurut hasil penelitian Balitbang Dikbud, mutu pengajaran sangat dipengaruhi oleh mutu

pengelolaan, mutu peserta didik, dan mutu guru. Mutu pengelolaan dapat dinilai dari kemampuan kepala sekolah dalam menciptakan suasana sekolah yang memungkinkan guru dan peserta didik belajar aktif. Sedangkan mutu peserta didik dapat dinilai dari segi ciri yang dimiliki peserta didik itu secara fisik kesehatannya dan intelegensinya serta aspirasinya. Mutu guru dapat dikenali dari kemampuan profesionalnya, upaya profesional dan waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesionalnya.

a. Karakteristik Mutu Pendidikan

Di muka dikemukakan bahwa mutu dalam pendidikan mempunyai dimensi yang khas, yang membedakannya dalam industri. Dalam pendidikan, mutu merujuk pada dua hal, yaitu proses dan produk. Proses pendidikan termasuk bermutu jika proses belajar dan mengajar berlangsung efektif. Artinya tujuan pendidikan dapat dicapai peserta didik melalui proses belajar. Sedangkan produk pendidikan termasuk bermutu, jika memenuhi ciri-ciri berikut ini:

- a. ***Peserta didik*** menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan (kompetensi).
- b. ***Hasil pendidikan*** sesuai dengan kebutuhan lingkungan khususnya dunia kerja (relevansi).
- c. ***Hasil pendidikan*** sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga dapat melakukan sesuatu untuk keperluan hidupnya dalam rangka

penyesuaian diri dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan dimasyarakat (Fleksibilitas).

- d. *Hasil pendidikan* tidak mengakibatkan adanya pemborosan sosial (efisiensi).
- e. *Hasil pendidikan* dapat menghasilkan sesuatu yang produktif (berdaya hasil).
- f. *Hasil pendidikan* memberikan kepastian/jaminan mutu.
- g. *Hasil pendidikan* dapat dipertanggung jawabkan (kredibilitas) dari segi kemampuan.
- h. *Hasil pendidikan* memberikan sesuatu yang memenuhi spesifikasi dan bernilai tinggi sehingga mengakibatkan justifikasi uang yang dikeluarkan pemakainya.
- i. *Hasil pendidikan* dapat merespons (responsiveness) tuntutan kebutuhan masyarakat.
- j. *Hasil pendidikan* dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang relatif lama (durability).
- k. *Hasil Pendidikan* dapat memberikan sesuatu yang menarik dan berseni (estetik)
- l. *Hasil pendidikan* dapat dilihat dari unjuk kerja (performance) dan etos kerja.
- m. *Hasil pendidikan* memiliki kebebasan dan bahaya, resiko atau keraguan (security).

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka karakteristik hasil (output) pendidikan antara lain:

- a. Hasil pendidikan itu *bersifat intangible* (abstrak) sehingga sukar diukur secara kuantitatif dan juga sukar mengadakan standarisasi hasil pendidikan, (tidak seperti mutu barang)
- b. Hasil pendidikan itu *bersifat multifaset* atau bersegi banyak dari abstrak sampai konkrit (lulusan).
- c. Hasil pendidikan itu *bersifat equifinality* yaitu suatu output yang dapat dicapai dengan berbagai cara, sehingga pada hakikatnya sukar menentukan cara mana yang berpengaruh terhadap suatu produk pendidikan.
- d. Hasil pendidikan bukan hasil *yang bersifat mendadak*, tetapi merupakan proses jangka panjang.
- e. Hasil pendidikan bukan hanya suatu hasil teknologi yang *konvensional, tradisional, dan teknologi modern*, sehingga sukar menetapkan standar teknologi yang tepat bagi suatu produk pendidikan.
- f. Mutu dalam dunia pendidikan merupakan nilai yang diacu oleh guru, kepala sekolah, penilik, pengawas dan pengelola sistem pendidikan lainnya.
- g. Komitmen dan kepedulian semua pihak terutama pemerintah terhadap mutu sangat tinggi dapat dilihat dari berbagai upaya dan proyek-

proyek peningkatan mutu, seperti dalam pendas di SD melalui Sistem Pembinaan Profesional (SPP), kerjasama diknas dan Overseas Development Administration (ODA), penerapan strategi peningkatan mutu melalui KKG yang mirip dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) di dunia industri. Proyek dinilai berhasil di daerah percobaan seperti di Cianjur, dan ditumbuh-kembangkan di NTB, Sul-Sel, Lampung dan Jawa Timur.

b. Mutu dan Relevansi Pendidikan

Jika Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah dapat melaksanakan keempat perannya itu dengan baik, maka diasumsikan bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kiranya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan nasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kaitan dengan mutu dan relevansi pendidikan dalam buku acuan operasional dan indikator kinerja Dewan Pendidikan (2005) di jelaskan bahwa, beberapa indikator keberhasilan pendidikan perlu dimonitor sebagai kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Mutu dapat diukur dari beberapa efektif pengelolaan sistem pendidikan, melalui MBS, dapat memberikan efek terhadap prestasi belajar siswa secara optimal. Yang paling tepat untuk mengukur mutu pendidikan sebenarnya adalah hasil evaluasi ujian akhir yang diukur melalui Ujian Akhir

Nasional, namun kegiatan monitoring yang dilakukan ini tidak secara langsung mengukur output pendidikan dalam pengertian prestasi belajar siswa secara akademis. Yang dimaksud dengan relevansi adalah, seberapa jauh hasil-hasil pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, misalnya, penghasilan, lulusan, keterampilan lulusan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan sebagainya. Namun, sistem ini lebih tepat untuk memantau sejauh mana Dewan Pendidikan dapat memberikan pengaruh dan dorongan terhadap situasi belajar yang kondusif bagi peningkatan mutu serta relevansi pendidikan. Depertemen Pendidikan Nasional Dirjen Manajemen Pendidikan dasar dan menengah dalam buku acuan operasional kinerja Dewan Pendidikan (2005) menjelaskan beberapa indikator mutu yang dapat dipantau oleh sistem ini antara lain adalah sebagai berikut

- a. Peningkatan presentase lulusan terhadap jumlah murid tingkat akhir yang mengikuti ujian
- b. Pendayagunaan sarana prasarana belajar lebih optimal di sekolah-sekolah (seperti buku pelajaran, perpustakaan, alat pelajaran, media pendidikan, dan pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar).
- c. Meningkatkan kualitas guru yang diukur dari rata-rata tingkat pendidikan guru dan jumlah penataran yang diikuti.
- d. Presentase siswa pendidikan pra sekolah terhadap jumlah penduduk usia pra sekolah.

B. Penelitian Relevan

Hasil penelitian relevan yang dijadikan sebagai bahan pendukung dalam melaksanakan penelitian ini yaitu:

1. Laporan penelitian Tim UNY (2011) mengenai “Kajian Evaluasi Dampak Peran Dewan Pendidikan /Komite Sekolah terhadap peningkatan Mutu Pendidikan sangat diperlukan sebagai wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kinerja Dewan Pendidikan secara keseluruhan mendapat nilai rata-rata 76,5; sedangkan kinerja Komite Sekolah mendapat nilai rata-rata 76,5. Nilai kinerja Dewan Pendidikan secara kualitatif dapat dikategorikan pada nilai sedang dan nilai komite sekolah dikategorikan cukup baik.
2. Hasil Penelitian Rendra Vicky Firmansyah (2015) mengenai “Proses Pengawasan Dewan Pendidikan Surabaya dalam Mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan” yang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Surabaya belum optimal, sebab Dewan Pendidikan Surabaya jarang melakukan monitoring langsung, monitoring langsung biasanya dilakukan oleh Dewan Pendidikan Surabaya hanya ketika muncul permasalahan pendidikan yang terjadi di Kota Surabaya, sehingga Dewan Pendidikan Surabaya tidak dapat mengidentifikasi secara langsung sebab dan akibat masalah pendidikan yang terjadi di Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang secara umum menunjukkan bahwa kinerja dan peran Dewan Pendidikan di berbagai daerah masih belum optimal sehingga menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait peran Dewan Pendidikan dengan judul peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng, dengan tujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan peran Dewan Pendidikan Kabupaten bantaeng di akhir periode ini.

C. Kerangka Konsep

Meningkatkan mutu pendidikan dan pemberdayaan serta pelibatan masyarakat sebagai pengguna jasa sekolah, sekolah seharusnya menjalin kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat atau Dewan Pendidikan/Komite Sekolah, menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota diharapkan meningkatkan mutu pendidikan, serta membutuhkan keterlibatan aktif dari para orang tua/masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendidikan itu sendiri.

Wajah Dewan Pendidikan dalam realitas sosial belum terlalu jelas adanya, keberadaan Dewan Pendidikan dianggap sebagai lembaga stempel yang dibutuhkan pada saat pencairan dana/anggaran sekolah. Dewan Pendidikan sebagai lembaga yang mandiri, yang hanya mempunyai hubungan yang sifatnya koordinatif dengan dinas Pendidikan dan komisi E DPRD menjadi tantangan tersendiri untuk mencari solusi bagaimana Dewan Pendidikan dapat berperan pada pendidikan tingkat Kabupaten/Kota.

Sasaran Meningkatkan mutu pendidikan Dewan Pendidikan adalah komite sekolah sebagaimana yang disebutkan oleh *tim pengembangan Dewan Pendidikan* bahwa Dewan Pendidikan bersinergi dengan komite sekolah dalam menyuksekan pendidikan. Hal tersebut mejadi kemenarikan tersebdiri bagi peneliti

untuk mengetahui sejauh mana peran Dewan Pendidikan terhadap Meningkatkan mutu pendidikan SMPN di Kabupaten Bantaeng.

Dewan Pendidikan diharapkan memainkan peranannya dengan aktif, memberikan ide-ide, kritik, masukan dan penilaian secara objektif dan akuntabel. Dewan Pendidikan dapat memposisikan dirinya sebagai aspirator masyarakat dan wali murid kepada pihak sekolah.

Peran yang dijalankan Dewan Pendidikan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 adalah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten/Kota; sebagai pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat.

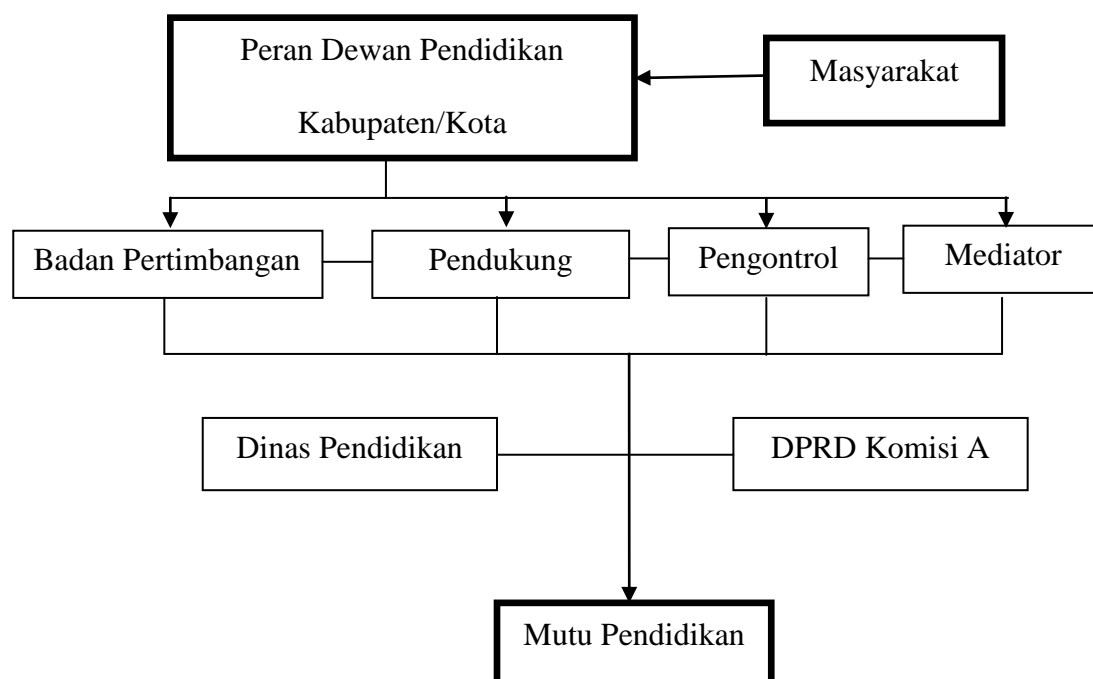
Peran Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dilihat dari seberapa maksimal pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Pendidikan. Dalam penelitian ini akan dikemukakan presentase dari peran Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Dewan Pendidikan juga tidak boleh menjadi eksekutor yang ditakuti oleh lembaga yang harus di ajak mandiri. Yang diharapkan adalah dewan pendidikan yang benar-benar mengembangkan pola kemitraan dengan daerah dan sekolah karena Dewan Pendidikan punya wewenang dan kegiatan pokok yang dimilikinya”.

Peran Dewan Pendidikan akan jauh lebih baik jika memaknai peran dan fungsi yang telah diamanatkan pada Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tersebut.

Kemudian selanjutnya bagaimana Meningkatkan mutu pendidikan Dewan Pendidikan terhadap komite-komite sekolah yang ada di Kabupaten/Kota.

Peran dewan pendidikan yang maksimal tentu akan memberikan dampak kepada pendidikan dalam hal ini mutu pendidikan yang ada di Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini peneliti akan mempersempit pada wilayah studi kasus di SMPN 1 Bantaeng, SMPN 1 Pa'jukukang, SMPN 1 Tompobulu.

Dari uraian di atas, maka secara skematis alur pola pikir tergambar sebagai berikut:



Bagan 1.1 Kerangka Konsep Peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kab. Bantaeng

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan jenis kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan desain penelitian deskriptif yang dapat berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati.

Semua data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif yang berupa pernyataan dari para informan digambarkan dalam bentuk narasi dari hasil pernyataan lisan. Begitu pula dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang ditemukan di lokasi penelitian. Semua data-data yang diperoleh ini selanjutnya dipaparkan berdasarkan uraian informasi yang diperoleh dari informan yang mengetahui persis pokok persoalan yang akan diteliti.

B. Kehadiran Peneliti

Sugiono (2013) dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data dilapangan, selain itu peneliti juga mutlak memiliki beberapa persyaratan sebagai instrumen agar data yang di kumpulkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data sehingga keberadaannya di lokasi penelitian mutlak diperlukan

Sesuai dengan fokus penelitian yang diinginkan, maka penelitian ini diarahkan kepada lembaga/instansi pemerintah terkait dengan Dewan Pendidikan serta beberapa sekolah sebagai pendukung, tentunya yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Penelitian ini memilih informan penelitian yaitu Ketua Dewan Pendidikan, Komisi A DPRD Kabupaten Bantaeng, Kepala Dinas Pendidikan/perwakilan yang ditunjuk, komite-komite sekolah SMP Negeri di Kabupaten Bantaeng, serta Kepala Sekolah. Pemilihan informan penelitian ini didasarkan pada kriteria bahwa mereka mengetahui betul bagaimana peran Dewan Pendidikan terhadap Meningkatkan mutu pendidikan SMP Negeri di Kabupaten bantaeng

Berdasarkan hal tersebut, kehadiran peneliti dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini, penelitian berperan sebagai instrumen kunci dan melibatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan yang diteliti dan bukan bermaksud mempengaruhi obyek yang akan diteliti tapi semata-mata untuk mendapatkan data yang akurat.

C. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng, secara khusus pada lokasi SMP Negeri yang ada di Kabupaten Bantaeng yaitu SMPN 1 Bantaeng, SMPN 1 Pa'jukukang, dan SMPN 1 Tompobulu. Dalam hal ini peneliti ingin melihat

bagaimana peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng.

D. Sumber Data

Fokus penelitian utama dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tentang gambaran peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng, dalam melakukan perannya sebagai lembaga mandiri, yang nantinya akan melihat bagaimana proses yang terjadi, oleh karena itu dibutuhkan adanya subjek atau informan. dalam penelitian ini, informan yang dibutuhkan sebanyak 9 orang (sembilan), subjek penelitiannya Ketua Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng/ Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng, Komisi A DPRD (Bidang Pendidikan) Kabupaten Bantaeng, Perwakilan Komite-Komite Sekolah Sebanyak tiga sekolah, dan Kepala Sekolah SMPN di Kabupaten Bantaeng, yang dipilih oleh Dinas Pendidikan sebagai sekolah dengan predikat Unggul, menengah, dan terendah, sehingga Kepala sekolah yang diwawancarai sebanyak tiga orang pula. untuk mengkonfirmasi data dari informan sebelumnya di Kabupaten Bantaeng. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada kriteria bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng, Komisi A DPRD Kabupaten Bantaeng, Komite Sekolah dan, kepala sekolah, adalah pelaku-pelaku yang mengetahui bagaimana peran Dewan Pendidikan terhadap Meningkatkan mutu pendidikan SMPN di Kabupaten Bantaeng.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini instrumen peneliti adalah peneliti itu sendiri, namun setelah sasaran penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian yang menggunakan wawancara secara langsung dan sederhana yang dapat mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan langsung atau observasi. Untuk kepentingan ini digunakan teknik pengumpulan data. Instrumen yang paling utama sebenarnya adalah peneliti.

Sebagaimana yang dikemukakan Nasution (1992:55) adalah “dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama” ini mengandung arti bahwa instrumen yang paling utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Dengan demikian alat-alat yang dipaparkan di bawah ini merupakan pelengkap. Keputusan penggunaan instrumen pelengkap ini didasarkan pada kerangka metode penelitian yang digunakan dan jenis serta karakteristik data yang diperlukan.

Data dikumpulkan berdasarkan atas fakta-fakta sesuai jenis data yang digunakan. Untuk mengumpulkan data primer, digunakan teknik wawancara dan observasi lapangan. Untuk data sekunder digunakan teknik dokumentasi

1. Observasi

Nasution (1992:56) “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.”

Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek permasalahan selama dalam pengamatan, peneliti berada di luar objek (non partisipasi) dengan menggunakan jenis observasi berstruktur, artinya peneliti telah mengetahui aspek-aspek dari aktifitas yang diamati dan relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Mulyana (2001:16) menjelaskan bahwa “wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.” teknik wawancara digunakan untuk memperoleh sejumlah informasi dari pikiran, perasaan, pendapat, pengetahuan dari orang-orang yang terlibat proses perumusan dan implementasi kebijakan pengembangan organisasi. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan oleh Nasution (1992:69) bahwa :

Observasi saja tidak memadai dalam melakukan penelitian. Mengenai kegiatan dan kelakuan orang saja tidak dapat mengungkapkan apa yang diamati atau dirasakan orang lain. Itu sebabnya observasi harus dilengkapi oleh wawancara.

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan yang berakaitan dengan peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Bantaeng

. Peneliti menggunakan dua jenis wawancara, yaitu: wawancara berpedoman (terikat) dan wawancara bebas, pengumpulan data dengan wawancara terikat didasarkan pada daftar pertanyaan lengkap dan terperinci sedangkan wawancara

bebas didasarkan pada pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, digunakan untuk memperoleh sejumlah data dan informasi berkenaan dengan gambaran benda-benda yang dijadikan acuan, alat atau fasilitas proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan tentang pengembangan organisasi. Subtansi bahan kajian dari setiap dokumen, berkaitan dengan bentuk dan rumusan kebijakan yang menyangkut tujuan organisasi, fungsi, peranan, rincian tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem dari organisasi, penyelenggaraan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta hasil-hasil yang relevan.

Teknik ini di gunakan untuk memperoleh data konkrit mengenai peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2005:91-99) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi”.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dibuat akan bersifat kredibel apabila setelah diverifikasi ternyata data-data tersebut yang disimpulkan didukung oleh bukti-bukti yang valid.

Untuk uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kamus, dan *member check*.

G. Pengecekan keabsahan data

Menurut Moleong (1991:26) “kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu : 1. kepercayaan (*kreadibility*), 2. keteralihan (*tranferability*), 3. kebergantungan (*dependibility*), 4. kepastian(*konfermability*).” Dalam penelitian kualitatif ini memakai 3 macam antara lain :

a. Kepercayaan (*kreadibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas ialah : teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan refrensi.

b. Kebergantungan (*depondibility*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering

dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui *audit dipendability* oleh *ouditor independent* oleh dosen pembimbing.

c. Kepastian (*konfermability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Moleong (1991:34) mengemukakan bahwa “Pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu : 1. tahap sebelum ke lapangan, 2. tahap pekerjaan lapangan, 3. tahap analisis data, 4. tahap penulisan laporan.” Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

- a. Tahap sebelum kelapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat peneliti, mencakup observasi lapangan dan permohonan ijin kepada subyek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Data tersebut diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
- c. Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melauai observasi, dokumentasi maupun wawancara yang mendalam dengan Dewan Pendidikan,

komite sekolah, kepala sekolah Komisi A DPRD, dan Dinas Pendidikan. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

- d. Tahap penulisan laporan, meliputi: kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan skripsi yang kemudian ditindaklanjuti. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat gambaran umum Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng yang menjadi lokasi penelitian.

A. Gambaran Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng

1. Sejarah singkat Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng

Sekolah berada pada jantung komunitas atau masyarakat setempat. Sekolah memiliki satu tradisi yang kaya tentang keterlibatan orangtua siswa dan komunitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Demikianlah pernyataan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, Ontario Kanada. Demikian pulalah sebenarnya hakikat sekolah di mata hati keluarga dan masyarakat Indonesia.

Prakarsa Bapak Ahmad Karim awalnya membentuk Badan Pertimbangan Dewan Daerah pada tahun 2002 sebelum ada UU No. 20 Tahun 2003. Badan Pertimbangan Dewan Daerah disingkat dengan BPDD. Pada tahun 2003 ada rapat di Padang dan BPDD sudah ada di Kabupaten Bantaeng sebelum dibentuk di rapat di Padang tersebut. Setelah lahir UU No. 20 Tahun 2003 pasal 51 ada yang mengatur tentang Dewan Pendidikan. Dalam anggaran dasar diatur masa kerja Dewan

Pendidikan lima tahun. BPDD di lebur menjadi Dewan Pendidikan, kemudian pak Ahmad Karim di tunjuk sebagai ketua berturut-turut 4 kali sampai sekarang.

2. Keadaan Kantor Dewan Pendidikan

Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri maka keberadaannya sangat berbeda dengan organisasi-organisasi yang berdiri. Lembaga secara formal diakui oleh pemerintah sedangkan organisasi bisa bersifat legal maupun tidak. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri kehadirannya berbasis kebutuhan sesuai konteks zaman yang ditawarkan.

Kantor Dewan Pendidikan sekarang di BTN Arakeke Blok C No. 15 di rumah Bapak Ahmad Karim selaku ketua dari Dewan Pendidikan itu sendiri. Kantor atau sekretariat Dewan pendidikan dahulunya diusulkan bertempat di Dinas Pendidikan, namun intensitas kinerja Dewan Pendidikan yang mulai menurun, serta Dewan Pendidikan yang menyandang sebagai lembaga mandiri, tentu hanya punya hubungan koordinatif dengan dinas pendidikan, untuk itu inisiatif yang di ambil yaitu rumah bapak Ahmad Karim selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng.

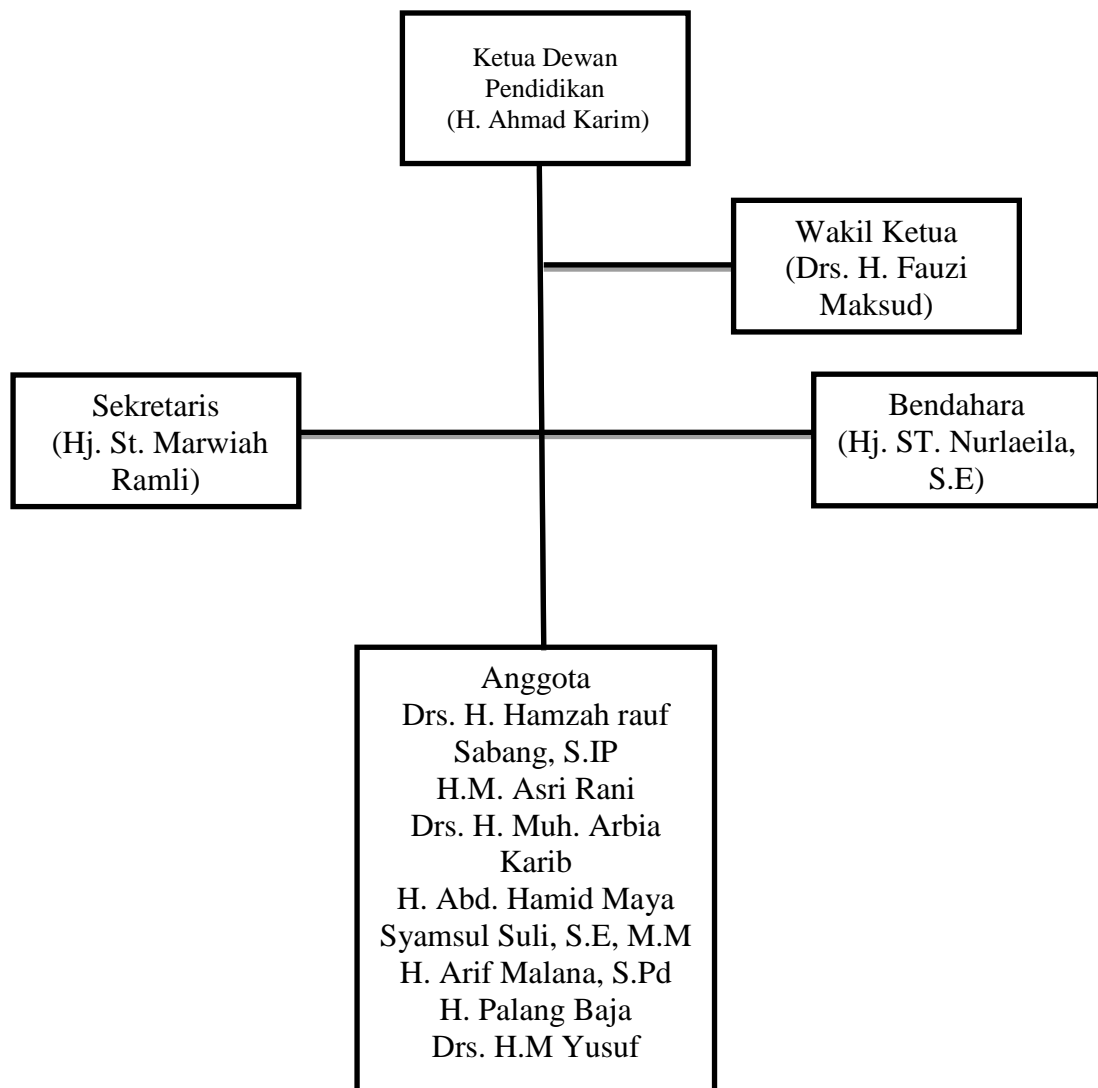
Kantor Dewan Pendidikan tidak begitu formal, tapi arsip dan dokumen dari semua kegiatan yang pernah diadakan oleh Dewan Pendidikan masih tersimpan rapi oleh Dewan Pendidikan. Sekretarian Dewan Pendidikan ini juga sering dijadikan tempat untuk bermusyawarah ataupun bersilaturahmi dengan Dewan Pendidikan.

Sarana prasarana atau fasilitas yang dimiliki Dewan Pendidikan yang tersisa hanya sebuah proyektor lama, yang masih memantulkan tulisan lewat tulisan tangan

dari cahaya proyektor itu sendiri. Selain daripada itu Dewan Pendidikan tidak banyak memiliki sarana maupun sarana lainnya

Dokumen-dokumen atau arsip Dewan Pendidikan pun sudah lama paling baru tahun 2008 sementara sekrang kepengurusan Dewan Pendidikan berada di tahun 2017.

3. Struktur Organisasi Dewan Pendidikan



B. Hasil Penelitian

Berikut ini akan diuraikan hasil kajian lapangan yang erat kaitannya dengan fokus yang diteliti yaitu Peran Dewan Pendidikan terhadap Meningkatkan mutu pendidikan SMPN di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil observasi selama ini, ditemukan bahwa peran dewan pendidikan selama dua tahun terakhir ini mengalami stagnansi, ini karena efek daripada kompleksitas regulasi pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga pengawasan pada tingkat SMPN sangat banyak sehingga Dewan Pendidikan akan turun ke lapangan ketika ada masalah urgen. Sesuai yang diungkapkan oleh ketua Dewan Pendidikan bahwa memang kinerja Dewan Pendidikan pada dua tahun terakhir tidak intens lagi, hal tersebut dikarekanan pengurus Dewan Pendidikan itu sendiri yang perlu untuk rekomposisi, serta sinergitas yang belum terbangun penuh oleh pemerintah daerah terkait.

Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga mandiri, mengajak kepada para pengurus untuk memberikan sumbangsi materi maupun non materi secara sukarela. Perlu adanya kesadaran terhadap pendidikan untuk merubah, bagi setiap pengurus Dewan Pendidikan.

Peran dalam hemat penulis bahwa, sumbangan yang diberikan berupa aplikasi peran kepada sejumlah sasaran pendidikan yang ada di daerah tersebut, Dewan Pendidikan yang sifatnya peran serta memberikan efek Meningkatkan mutu pendidikan, sebatas memberikan saran, bukan mengintervensi, sehingga apa yang

disebut dengan Meningkatkan mutu pendidikan adalah program kerja yang menjadi peran bisa memberikan pertimbangan dan kontrol bagi setiap stakeholder pendidikan.

Dewan Pendidikan hadir sebagai bentuk reflektif dari desentralisasi pendidikan nasional. Desentralisasi pendidikan nasional dilaksanakan atas dasar pemikiran bahwa masyarakat di daerah merupakan fondasi yang kuat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Sisi moralnya adalah “masyarakat daerahlah yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri” dan mereka itulah yang harus berperan lebih besar sebagai penentu kebijakan operasional, penanggung jawab, serta pelaksana terdepan dari pengelolaan sistem pendidikan nasional.

Sesuai dengan konsep desentralisasi pendidikan, masyarakat dianggap sebagai pihak yang paling menentukan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah di setiap daerah. Masyarakat adalah sumber dan sasaran yang harus dicapai dari sumber pendidikan di daerah.

Dewan Pendidikan adalah nama generik. Artinya, nama badan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, seperti Dewan Pendidikan, Majelis Pendidikan, atau nama lain yang disepakati.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak A. K selaku ketua Dewan Pendidikan yang diwawancarai pada tanggal 16 November 2017 mengatakan bahwa:

Pendidikan tanggung jawab utamanya adalah keluarga, masyarakat lalu pemerintah. Tapi dalam negara kita yang pertama adalah pemerintah. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Kehadiran dewan pendidikan hanya peran serta tidak memberikan kebijakan.

Hal ini juga ditambahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau yang mewakili beliau yaitu Ibu AY yang diwawancarai pada tanggal 17 November 2017 mengatakan bahwa

Memang bahwa Dewan Pendidikan adalah wakil dari masyarakat untuk memberikan sumbangsi saran kepada kami selaku yang berada di lingkup pemerintahan, dan sifatnya kepada dinas pendidikan koordinatif saja, tidak ada hak untuk mengintervensi. Karena sifat yang dimiliki Dewan Pendidikan juga adalah lembaga mandiri. Tapi kami sangat salut dengan dewan pendidikan sekarang, pengurusnya merupakan para orang tua kita yang masih setia untuk memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten bantaeng.

Peran Dewan Pendidikan bisa dilihat dari sinergitas antara pemerintah dan masyarakat bagaimana serta peran yang dijalankan dengan melihat program kerja dari Dewan Pendidikan itu sendiri. Peran akan memicu bagaimana Meningkatkan mutu pendidikan terjadi pada SMPN di Kabupaten Bantaeng. Tapi karena alasan Dewan Pendidikan tidak ada aktivitas organisasi selama dua tahun terakhir menjadikan Dewan Pendidikan terkubur oleh kompleksitas regulasi pemerintah daerah.

Penjelasan anggota komisi A (Bidang Pendidikan dan perencanaan hukum)

DPRD Kabupaten Bantaeng Bapak SU bahwa:

Peran Dewan Pendidikan dan hubungannya dengan komisi kami yaitu komisi A selaku bidang pendidikan sampai hari ini belum terasa, ya walaupun esensi dari Dewan Pendidikan sangatlah penting. Saya kenal dengan bapak Dewan Pendidikan tapi sampai hari ini kami sadari bahwa keterbukaan DPRD dan Dewan Pendidikan belum nampak, sehingga harmonisasi yang terbangun belum terasa dan muncul dipermukaan. Kalau saya bilang bahwa Dewan Pendidikan sangat penting adanya, tapi kami sarankan ada recomposisi, karena pengurus-pengurusnya kasian sudah perlu untuk beristirahat dari aktifitas formal pendidikan, walaupun kami sadari

mereka adalah ahli-ahli pendidikan, karena telah melewati pahit manis pendidikan jaman dulu dan sampai sekarang, kami pun tidak bisa memaksakan bapak Dewan Pendidikan untuk melakukan program-program pendidikan. iya seperti itu saja. (Wawancara 22 November 2017)

Berdasarkan beberapa pemaparan informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran dewan pendidikan secara umum belum terlalu jelas, dan belum terasa, hal tersebut disebabkan karena keadaan Dewan Pendidikan itu sendiri serta kondisi eksternal seperti pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan pada SMPN sangatlah lengkap, sehingga Dewan Pendidikan turun tangan saat ada masalah urgen saja serta Dinas Pendidikan atau DPRD sendiri yang meminta secara langsung saran dari Dewan Pendidikan.

1. Peran Dewan Pendidikan sebagai Badan Pertimbangan

Dewan Pendidikan sebagai Badan pertimbangan dijelaskan bahwa Sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya sekolah-sekolah yang berkualitas. Karena kualitas menjadi barometer, maka usaha untuk meningkatkan kualitas dan perceptive harus dilakukan secara konsisten.

a. Kebijakan dan program pendidikan

Sesuai yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng bahwa: “Dewan Pendidikan sebagai peran serta, tidak menginterpendensi kebijakan apa yang harus diambil, melainkan Dewan Pendidikan hanya sebatas memberi saran

dalam pertimbangan-pertimbangan beberapa hal, seperti kriteria pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan sekolah dan menuangkut masalah kesiswaan”.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak SA selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Bantaeng bahwasanya “Dewan Pendidikan seyogyanya memang tidak boleh menginterpensi program kerja, kebijakan serta kriteria-kriteria yang berkaitan dengan pengembangan 8 standar, sekolah kami banyak berkonsultasi dengan dinas pendidikan terkait hal tersebut”

Kompleksitas aturan di jaman sekarang, membuat Dewan Pendidikan seakan-akan terkubur akan peran dan fungsinya, dimana dewan pendidikan dikenal sebagai lembaga yang beranggotakan pakar pendidikan. Sesuai yang diungkapkan oleh ketua Dewan Pendidikan bahwa

Dewan Pendidikan dan hubungannya dengan SMPN tidak begitu bersinergi, dikarenakan yang pertama bahwa Dinas Pendidikan memberikan pengawasan yang begitu kompleks, serta di luar daripada dinas pendidikan banyak sistem yang mengatur sehingga manajemen sekolah dan dewan pendidikan tidak begitu terlalu mencampuri, mereka datang saat ingin berkonsultasi saja. (wawancara November 18 2017)

Kembali diungkapkan oleh Bapak KA selaku Kepala SMPN 1 Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng bahwa

Dewan Pendidikan dalam memberikan pertimbangan sejauh yang kami ketahui bahwa Dewan Pendidikan belum pernah terjun langsung ke SMPN secara khusus, hanya jika ada pertemuan yang kami tidak ketahui dengan komite sekolah. Yang jelas Dewan Pendidikan secara teknis bersentuhan dengan Dinas Pendidikan secara langsung, barulah kemudian Dinas yang memberikan saran dan perintah ke sekolah-sekolah

Kemudian pemaparan dari wawancara Bapak JU selaku ketua komite sekolah SMPN 1 Pa'jukukang bahwa:

Komite sekolah pa'jukukang dan dewan pendidikan itu kurang mengetahui satu sama lain, tapi kalau kenal iya saya kenal beliau, mengenai memberikan pertimbangan pada program kerja, kami komite sekolah pun jarang mengadakan kegiatan atau program-program pendidikan, sehingga apa yang menjadi tujuan Dewan Pendidikan kami akui tidak punya akses. (wawancara 18 November 2017)

Berdasarkan jawaban dari informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan dan program pendidikan yang akan dijalankan tidak sepenuhnya mengambil saran dari Dewan Pendidikan namun, Dewan Pendidikan hanya memberikan pertimbangan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten yang selanjutnya diimplementasikan ke sekolah-sekolah khususnya pada SMPN di Kabupaten Bantaeng

b. Rencana dan anggaran pendidikan dan belanja sekolah

Rencana Pendapatan dan Belanja sekolah atau RAPBS adalah pilar manajemen sekolah dengan RAPBS inilah semua kegiatan sekolah direncanakan, tidak sekedar teknis. Dana yang didapatkan dari pemerintah dan masyarakat serta dana bantuan lain yang mungkin didapatkan sekolah, diatur sedemikian rupa sehingga penggunaannya jelas dan terbuka. Hal ini juga untuk membiasakan keterbukaan dalam sistem manajemen.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti peroleh dari informan yaitu ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng AK yaitu:

Mengenai RAPBS, sebenarnya dalam penyusunan RAPBS para kepala sekolah seabiknya mengikutkan komite sekolah , cuma apakah itu dilaksanakan atau tidak tapi dewan pendidikan tidak pernah dilibatkan persoalan keuangan. Lagi-lagi Dewan Pendidikan hanya peran serta dan sejauh ini Dewan Pendidikan belum pernah dilibatkan dalam perencanaan keuangan sekolah apapun (wawancara 16 November 2017)

Hal ini senada yang dikatakan oleh ibu AY selaku Kasi Kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMP Kabupaten Bantaeng pada Dinas Pendidikan yaitu:

Dinas Pendidikan secara khusus belum pernah berkonsultasi masalah RAPBS kepada Dewan Pendidikan, selama saya menjabat di Kasi Kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMP sejauh ini belum. Karena Dinas Pendidikan dalam menangani RAPBS itu berbagai kompenen dinas bisa menagnani, lagian kami berkonsultasi ke mereka itu sudah lama. Sekarang berkontak Dewan Pendidikan sudah jarang kami lakukan (wawancara 17 November 2017)

wawancara dengan Bapak SY selaku Ketua Komite Sekolah SMPN 1

Tompobulu mengatakan bahwa:

Komite sekolah dan RAPBS hubunganya tidak terlalu menyoroti, kami hanya diundang pada saat rapat-rapat penerimaan siswa baru, masalah RAPBS belum. Dewan Pendidikan dan komite sekolah kami jarang berkonsultasi masalah RAPBS tersebut. RAPBS sepenuhnya ditangani oleh sekolah, kami tidak menginterpensi pendanaan sekolah (wawancara 20 November 2017)

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan bahwa Dewan Pendidikan belum pernah memberikan pertimbangan terkait RAPBS di sekolah menengah pertama Negeri Kabupaten Bantaeng. Hal tersebut disebabkan karena kaktifan Dewan

Pendidikan dua tahun terakhir tidak begitu intens, sehingga Meningkatkan mutu pendidikan dan perannya terhadap RAPBS belum terlaksana.

c. Kriteria tenaga kependidikan

Manajemen ketenagaan adalah upaya menata para personel sekolah dalam keahlian dan hubungan sosialnya, melalui personel diterima bekerja sampai kepada pengembangan karirnya. Guru sendiri itu diarahkan pada kemampuan profesionalnya lebih diarahkan pada bagaimana guru memiliki kematangan sosial maupun emosional dalam berinteraksi dengan siswa.

Hasil wawancara peneliti peroleh dari informan yaitu ketua Dewan Pendidikan kabupaten Bantang AK yaitu:

Pernah dewan pendidikan memberikan peta, jumlah guru yang mengajar di daerah dan kota, dan Mayoritas guru adalah wanita. Suami kerja di kota. Suami di kota istri kerja di desa. Bagaimana supaya guru di dekatkan antara rumah dan tempat mengajarnya. Dewan Pendidikan sudah berikan gambaran masalah tersebut. Tapi pemerintah berat juga untuk mengaplikasikan, bahkan sampai sekarang. (wawancara 16 November 2017)

Hal tersebut diungkapkan oleh ibu AY selaku kepala bagian Kasi Kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMP di Dinas Pendidikan bahwa

Dinas pendidikan menempatkan pendidik dan tenaga pendidikan berdasarkan aturan dari delapan standar nasional pendidikan tersebut. Sejauh ini belum ada saran atau pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pendidikan. Saya sudah katakan tadi selama dua tahun terakhir belum ada kontak dengan Dewan Pendidikan. (wawancara 17 November 2017)

Hal tersebut diungkapkan oleh bapak JU selaku ketua komite sekolah SMPN

1 Pajukukang mengatakan bahwa:

Sejauh yang saya ketahui kita pernah diundang dalam suatu pertemuan dan yang hadir sebagai penasehat adalah Dewan Pendidikan, beliau menjelaskan dan memetakan tenaga pendidik dan kependidikan. Tapi sejauh ini belum ada aplikasi dari pemerintah, pertemuan tersebut sudah lama, sejak dua tahun terakhir ini saya sebagai komite sekolah SMPN 1 Pajukukang belum pernah berkonsultasi langsung masalah tersebut. Semoga kedepannya ada perubahan untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng karena pendidikan sangat penting untuk masa depan bangsa (wawancara 21 November 2017)

hal berbeda diungkapkan oleh Bapak AG selaku Kepala sekolah SMPN 1

Pajukukang bahwa

Dewan Pendidikan sejauh ini belum pernah memberikan pertimbangan terkait dengan kriteria tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan kan masuk dalam 8 standar dan 8 standar adakah campur tangan, jadi 8 standar itu ada sektornya dinas pendidikan, ada juga sekolah, tentang standar ketenagaan kewenangannya pemerintah daerah, kemudian supra, itu ada di sekolah. (wawancara 18 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa Dewan Pendidikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum pernah memberikan pertimbangan sekaitan dengan tenaga kependidikan yang ada di sekolah.

d. Kriteria Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan atau sarana dan prasarana yang ada disekolah merupakan penunjang pembelajaran bagi siswa, agar siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan berdasarkan teori saja, akan tetapi juga mendapatkan pengetahuan melalui praktek, dan dengan adanya fasilitas pendidikan ataupun sarana dan prasarana lebih memudahkan guru dalam memberikan mata pelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh informan (AK) Ketua

Dewan Pendidikan Kabupaten bantaeng, yaitu :

Sarana prasarana. Dewan pendidikan tidak terlalu ikut memberikan pertimbangan, karena di sekolah sudah ada aturannya. Dewan pendidikan tidak terlalu banyak mencapuri urusan fasilitas pendidikan. Dan juga komite sekolah sekarang bukan lagi pada esensinya, dilihat dari pengadaan sarana maupun prasarana sekolah maka sekolah ataupun yang akan memberikan fasilitas melihat siapa komite sekolahnya. (wawancara 16 November 2017)

Hal tersebut senada diungkapkan oleh perwakilan dinas pendidikan kabupaten bantaeng ibu AY selaku Kasi Kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMP Kabupaten Bantaeng, yaitu:

Sapas, pemenuhan 8 standar nasional sudah ada hanya dalam bentuk surat keputusan. Mengenai hal tersebut Dewan Pendidikan itu belum sama sekali memberikan pertimbangan pada bagian sarana dan prasarana pendidikan, tetapi dalam rangka pemenuhan, kegiatan pelaksanaan kurikulum 13 pemenuhan 8 strandar harus dilaksanakan pada satuan pendidikan. (wawancara 18 November 2017)

Kembali diungkapkan oleh bapak SA selaku kepala sekolah SMPN 1 Bantaeng bahwa “konsultasi masalah sarana dan prasarana belum, dengan komite juga belum pernah, karena sarana dan prasarana dalam kriterianya sekolah langsung berhubungan dengan dinas pendidikan” (wawancara pada tanggal November 18 2017).

Ungkapan dari Bapak JU selaku ketua komite sekolah SMPN 1 Pa'jukukang bahwa:

Memberikan pertimbangan pada rana sarana dan prasana tidak terlalu, karena keberadaan Dewan Pendidikan setahu saya hanya ee hanya memberikan masukan sama dinas, kami hanya menunggu arahan apa yang mau diberikan oleh bapak kepala dinas. Dewan Pendidikan itu tidak pernah juga diganti kasian, dari saya masih guru

honorar sampai pns masi bapak itu yang menjabat, ada juga beberapa pengurusnya meninggalmi,

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh beberapa informan maka dapat disimpulkan, bahwa Dewan Pendidikan belum pernah melakukan pertimbangan sekaitan daengan ktiteria fasilitas pendidikan atau sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini dilihat dari bukti kerja dan sesuai yang diungkapkan oleh ketua Dewan Pendidikan, bahwa masalah sarana dan prasarana Dewan Pendidikan belum memberikan pertimbangan terkait hal tersebut karena aturan yang sudah kompleks masalah 8 standar.

2. Peran Dewan Pendidikan sebagai Pendukung

Menurut Purwanto (1998) pendukung adalah kesedian atau kecendrungan seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu, apabila kelompok tersebut mendapat rangsangan. Sikap pendukung dapat terjadi pada situasi tertentu, orang, kelompok, nilai-nilai terjadi di sekitar manusia.

a. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan

Partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pendidikan yang ada disekolah merupakan salah satu tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan kualitas sekolah, dengan memberikan masukan-masukan yang membangun, baik itu program sekolah dan meyalurkan aspirasi yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AK selaku ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng, bahwa:

Dewan Pendidikan dan masyarakat, banyaknya anak-anak putus sekolah karena faktor ekonomi, kenapa bisa ekonomi sedangkan

pemerintah menyediakan wadah. Kalau SMP tidak banyak persoalan. Paradigma masyarakat terhadap pendidikan masih perlu diubah. Pengendalian sekolah setelah sudah terbagi, sewaktu waktu berkonsultasi dengan dinas pendidikan untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah, apalagi sekarang pemerintah banyak melakukan pelatihan-pelatihan, ikut serta biasanya kami hanya narasumber. Tugas berat dari pada kepala sekolah adalah mengubah paradigma masyarakat yang menganggap bahwa jika anak-anak sudah di sekolah orang tua tidak terlalu bertanggung jawab lagi. Bagaimana cara pandang sekolah dan dirumah. Biasa mereka hanya bilang *apaji na ajarangko gurunnu*. Dewan pendidikan menyarankan agar bisa mengatasi hal tersebut. Pendidikan adalah proses dan masalah yang berkepanjangan. Apa yang disebut masalah, adalah jarak keinginan dan fakta, orang bergerak didunia pendidikan tidak pernah berhenti untuk menangani hal tersebut. (wawancara 16 November 2017)

Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak AG selaku

Kepala Sekolah SMPN 1 Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng bahwa:

Hubungan sekolah dan masyarakat. Pertemuan yang dilakukan adalah sebatas menyampaikan orientasi seputar siswa baru, pertukaran sekolah, tetap kita berhubungan dengan masyarakat dan orang tua siswa. Perhatian masyarakat dan sekolah masih bagus. Dewan Pendidikan selalu mengadakan pertemuan itu dengan tokoh agama tokoh pemuda dan lain sebagainya, dalam rangka membantu sekolah, walaupun sekolah tidak dilibatkan langsung. Biasa memberikan motivasi kepada masyarakat, bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi masyarakat juga. (wawancara 18 November 2017)

Hal tersebut berbeda dengan yang diungkapkan oleh bapak SA selaku

Kepala Sekolah SMPN 1 Tompobulu bahwa

Sekolah dan masyarakat bagus, karena skitar sini, memberikan saran untuk rehab sekolah, bentuknya biasa kami adakan sosialisasi dalam rangka anak-anak mau ujian. Dalam rangka penerimaan beasiswa kami undang orang tua untuk datang, apakah itu pakaian, transport dan buku tapi sejauh ini Dewan Pendidikan belum pernah datang ke

sekolah secara langsung. Tapi masyarakat dan sekolah hubungannya bagus (wawancara 18 November 2017)

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan maka dapat disimpulkan, bahwa Dewan Pendidikan sejauh ini mendorong orang tua dan masyarakat melalui saran yang diberikan kepada pemerintah seperti dinas pendidikan dan kepala sekolah, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengubah paradigma masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.

b. Menggalang dana Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan

Menggalang dana masyarakat menggalang dana masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan didasari karena Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri tidak mendapatkan dana langsung dari pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak AK selaku ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

Masalah galang dana, Dewan Pendidikan terbuka dikalangan masyarakat, selain itu masyarakat sekitar belum pahan esensi dari keberadaan Dewan Pendidikan. tapi kelemahannya masyarakat berpikir semua sudah di tanggung pemerinah. Undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa tentang pendanaan bagaimana. Untuk itu paradigma masyarakat masalah galang dana tidak terlalu diperhatikan, dan kami sebagai Dewan Pendidikan pun belum pernah mengadakan hal semacam itu. (wawancara 16 November 2017)

Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak SY selaku ketua komite sekolah pada SMPN 1 Tompobulu bahwa “masalah galang dana Dewan Pendidikan dan komite sekolah sejauh ini kami belum mengetahui bagaimana

prosesnya, dan juga belum ada sosialisasi terkait hal tersebut.” (wawancara 21 November 2016)

Kemudian kembali diungkapkan oleh pihak dinas Pendidikan ibu AY selaku Kasi Kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMP di kabupaten Bantaeng bahwa “memang Dewan Pendidikan tidak memperoleh dana dari pemerintah, namun sejauh ini aktivitas galang dana yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan belum ada dan nampak, juga program-programnya belum terlihat sampai sekarang” (wawancara 17 November 2017)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas mengenai galang dana masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Dewan Pendidikan belum pernah mengadakan galang dana pada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan karena kurangnya sosialisasi terkait galang dana masyarakat terhadap Dewan Pendidikan.

- c. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan

Hubungan sekolah-masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat baik dukungan moral maupun finansial. Masyarakat di sini meliputi masyarakat setempat dimana sekolah itu berada, orang tua murid, masyarakat pengguna pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan. Dalam konsep pendidikan diperlukan kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang dimulai dengan komunikasi. Dalam komunikasi satu sama lain diperlukan inisiatif dari kedua belah pihak. Komunikasi interaktif menempatkan semua pihak sama penting. diharapkan mampu

menyampaikan pesan yang berhubungan dengan kebutuhan belajar anak. Komunikasi yang interaktif perlu dilanjutkan dengan tindakan partisipatif, yakni mengembangkan hubungan kerja sama sekolah, orangtua dan masyarakat untuk menjadikan lingkungan kondusif dalam menunjang efektifitas pembelajaran anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AK selaku ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng bahwa :

Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tentunya tidak mudah membangun kesadaran tersebut, dilihat dari sisi bahwa paradigma masyarakat terhadap pendidikan masih perlu untuk diluruskan dikarenakan undang-undang yang begitu kompleks mengatur tentang pendidikan. Kalau dulu saya kuliah di luar negeri dan mengambil penelitian partisipasi masyarakat, hal berbeda dilakukan oleh mereka yang disana dimana setiap masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekitar perumahannya. Nah hal tersebut berusaha diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tapi sayangnya sistem yang diberlakukan sangat berbeda. Nah, terkait dengan Dewan Pendidikan mendorong partisipasi masyarakat belum pernah diadakan sosialisasi terkait masalah tersebut. (wawancara 16 November 2017)

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh kasi kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMPN kabupaten Bantaeng ibu AY bahwa “Dewan Pendidikan belum pernah mengadakan sosialisasi terkait dengan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, kenapa karena memang selama dua tahun terakhir ini sejak saya pindah di kasi kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMP belum ada kontak dengan bapak dewan pendidikan” (wawancara 17 November 2017)

Dilanjutkan oleh ungkapan Bapak SA selaku kepala sekolah SMPN 1

Bantaeng mengatakan bahwa

kedekatan sekolah dan masyarakat intensitasnya tidak begitu terjalin, terkait dengan kegiatan Dewan Pendidikan dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan sejauh ini kami di sekolah belum dapat informasi terkait hal tersebut, komite sekolah pun tidak, bukan tidak tapi belum menginfokan sekaitan hal tersebut. (wawancara 18 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dewan Pendidikan dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan belum sama sekali di adakan baik berupa sosialisasi maupun tindakan secara langsung ke sekolah.

3. Peran Dewan Pendidikan sebaga Pengontrol

Peran Dewan Pendidikan sebagai pengontrol, dapat dikembangkan bahwa keberadaan Dewan Pendidikan akan terciptanya situasi yang transparan dan akuntabel antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penggunaan pembiayaan pendidikan. Kebijakan dan hasil dari usaha yang telah dilakukan Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam membantu pembiayaan pendidikan pada sekolah tersebut tidak hanya diserahkan sepenuhnya oleh pihak pengelola pendidikan, namun pelaksanaan kebijakan dan penggunaan pembiayaan tersebut tidak lepas dari kontrol Dewan Pendidikan, sehingga

terhindarnya penyalahgunaan kebijakan dan pembiayaan pendidikan pada sekolah tersebut. (Kompri: 2014)

- a. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sekolah.

Terkait Dewan Pendidikan melakukan evaluasi terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah sejauh ini belum pernah dilakukan oleh Dewan Pendidikan secara organisasi. Berdasarkan wawancara dengan ketua Dewan Pendidikan bapak AK bahwa “masalah evaluasi pengawasan kebijakan, belum pernah dilakukan oleh Dewan Pendidikan itu sendiri, dikarenakan karena situasi Dewan Pendidikan yang tidak lagi mendukung ”Senada dengan yang diungkapkan oleh komisi A DPRD Kabupaten Bantaeng Bapak SU bahwa:

Dewan Pendidikan sejauh ini belum pernah melakukan evaluasi selama saya ada di Komisi A ini, dan ini juga sangat penting karena akhir-akhir ini pendidikan di Bantaeng mengalmi kemunduran, salah satu indikator, hasil uji kompetensi guru di bawah standar provinsi dan pusat. Kemudian urutan pendidikan berada pada tingkat 23 se sul sel dan pendidikan Bantaeng di sejajarkan dengan NTT dan NTB. Program yang ditawarkan dunia pendidikan tidak sinkron.” (Wawancara 22 November 2017)

Selanjutnya ungkapan dari bapak SA selaku kepala sekolah SMPN 1 Bantaeng bahwa:

memang selama ini belum pernah dilakukan oleh Dewan Pendidikan, selama saya menjabat sebagai kepala sekolah disini, selama dua tahun, intensitas kegiatan dewan pendidikan belum pernah saya mendapatkan hal tersebut. Kalaupun ada evaluasi program yang dilakukan dengan komite sekolah, sejauh ini kami belum pernah melihatnya. (wawancara 18 November 2017)

selanjutnya ungkapan dari Bapak JU selaku ketua Komite Sekolah SMPN 1 Pa'jukukang bahwa “kami komite sekolah tidak pernah diawasi secara langsung oleh Dewan Pendidikan” (wawancara tanggal 22 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada indikator Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sekolah, Dewan Pendidikan belum pernah melakukan hal tersebut. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh beberapa informan diatas menunjukkan bahwa kinerja Dewan Pendidikan pada indikator evaluasi program masih perlu untuk ditingkatkan.

4. Peran Dewan Pendidikan sebagai mediator

Peran Dewan Pendidikan sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas hanyalah merupakan acuan dasar saja, karena Dewan Pendidikan pada dasarnya lebih berhak memperluas perannya dengan tidak hanya sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, melainkan Dewan Pendidikan juga dapat menjadi mediator antara pihak sekolah dengan masyarakat, donatur, pengusaha dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian sumber dana Dewan Pendidikan tidak hanya diperoleh dari pemerintah yang anggarannya tidak akan pernah mencukupi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Konsep atau acuan sebagai mediator di atas lebih mengarah pada permasalahan formal antara masyarakat dan pemerintah, contohnya masalah pencairan dana dari pemerintah dan lain sebagainya. (Kompri: 2014)

a. Melakukan kerja sama dengan stakeholder atau masyarakat

Melakukan kerja sama dengan stakeholder atau masyarakat bertujuan agar terbangun sinergitas antara masyarakat dan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada kegiatan bersama-sama dalam meningkatkan mutu pendidikan baik dari segi materi maupun non-materi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AK selaku ketua Dewan Pendidikan mengatakan bahwa:

Masalah kerja sama dengan masyarakat Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng belum melihat potensi masyarakat untuk diajak bekerja sama, beda dengan daerah lain, seperti dipulau Jawa yang notabene adalah pengusaha Dewan Pendidikan disana sangat sejahtera dan banyak melakukan kegiatan, bahkan sesekali mereka mengadakan pameran pendidikan. Kalau Bantaeng ini belum begitu bersinergi dilihat dari potensi masyarakatnya yang belum mempunyai. Biasanya juga ada sengketa, diantara satu orang ke person lain, maka dewan pendidikan menjadi mediasi untuk menangani, di SMPN jarang terjadi masalah. Bagaimana meningkatkan etos kerja ini sedang didiskusikan dengan dinas pendidikan. Wilayah SMPN, selalu berhubungan dengan kepala sekolah, bahasanya lebih tinggi, pemikiran lebih tinggi. Masalah terjadi di SMPN kemungkinan terjadi sangat kecil. Tidak ada tuntutan yang terasa, mereka merasa ada disekianya yang mengontrol. (wawancara 16 November 2017)

Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak SU selaku anggota komisi A bidang pendidikan DPRD Kabupaten Bantaeng bahwa:

Ada faktor yang mempengaruhi sehingga kurang sinergi. Saya rasa tidak ada karena kita terbuka, mungkin Dewan Pendidikan tidak terlalu nyambung, beliau juga tidak pernah audience dan kami juga tidak pernah menghadirkan pihak Dewan Pendidikan. Keluaran /output pendidikan. Salah satu indikator adalah tenaga pendidik. dan peserta didik hasil ujian nasional di SD di seajarkan dengan NTT dan NTB untuk skala kabupaten Bantaeng urutan 23. Hasilnya kan di ukur dari ujian nasional. (wawancara 22 November 2017)

Hal tersebut kembali diungkapkan oleh Ketua komite sekolah SMPN 1

Tompobulu mengatakan bahwa:

Hubungan sekolah dan masyarakat saya pikir sangat dekat dari apa yang saya amati selama ini keluaran SMPN 1 Tompobulu sangat-sangat berkualitas dan bisa diperhitungkan alumninya. Tetapi yang kami sayangkan selaku komite sekolah hal tersebut tidak terlalu terpublish sampai ke Dewan Pendidikan. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa memang dalam beberapa tahun terakhir ini kami nyaris tidak pernah berkomunikasi dengan Dewan Pendidikan, padahal kami sadari hal tersebut sangatlah penting. Faktor penghambatnya juga mungkin adalah karena kompleksitas aturan pendidikan dari pemerintah pusat, sehingga langkah kami menjadi terbatas walaupun hanya sebagai lembaga mandiri. (wawancara 22 11 2017)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal melakukan kerja sama dengan stakeholder atau masyarakat belum maksimal. Beberapa sekolah dilihat dari outputnya bagus semenjak sekolah diberikan wewenang untuk mengelolah manajemennya sendiri.

b. Menampung dan menganalisis ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan

Menampung dan menganalisis ide tujuannya adalah agar sebagai bahan pertimbangan Dewan Pendidikan dalam berperan serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, utamanya dalam bersinergi dengan dinas pendidikan dan DPRD kabupaten Bantaeng. Kemudian selain ide tuntutan juga berbagai kebutuhan yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat tersampaikan ke pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AK selaku ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng bahwa:

Hal tersebut belum pernah dilakukan, kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat, komite sekolah, serta kepala sekolah terakhir di

tahun 2008 lalu. Juga pernah mengadakan pelatihan khusus kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerjanya dan secara kuantitatif hal tersebut berhasil dilihat dari post test dan beberapa laporan dari kepala sekolah. Namun akhir-akhir ini kami sadari bahwa menampung ide tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara struktural belum kami laksanakan, semacam pertemuan dan sebagainya, namun secara kultural, dewan pendidikan masih membicarakan persoalan tersebut, dan beberapa pengurus yang ada di kabupaten Bantaeng senantiasa melaporkan bagaimana gejala yang timbul dimasyarakat sekaitan dengan pendidikan khususnya di satuan pendidikan (wawancara 16 November 2017)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak SU selaku anggota komisi A DPRD

Kabupaten Bantaeng bahwa:

Aspirasi masyarakat kami pihak DPRD menanggapi. Kmrin banyak aspirasi masyarakat salah satunya anak yang belum mampu melanjutkan pendidikan, dan kami menggelontorkan beasiswa. Bagi siswa yang tidak mampu, dan beasiswa penyelesaian studi. Aspirasi yang kami tampung dan kami anggrkan, pembangunan kemari dari DUK kita bagi secara profesional.kita sudah dorong ke polosok. Kemudian pengadaan bus sekolah. Lalu keberadaan Dewan Pendidikan pada hal tersebut belum nampak karena harus ada lembaga dari luar, memberi masukan agar pendidikan lebih baik, sekarang harus ada rekomposisi/perombakan kepengurusan, di butuhkan orang-orang yang paham tentang pendidikan dan memajukan pendidikan. Kodisi sekarang kan stagnan jalan ditempat. Org kata tertidur. Kita butuh masukan / sumbangsi saran bagi orang-orang berpengalaman. Harus ada rekomposisi pengurus, itu saran dari kami. (wawancara 22 11 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan Dewan Pendidikan belum pernah melakukan atau berperan masalah tersebut.

5. Mutu pendidikan SMPN di Kabupaten Bantaeng

Menurut Mathis (2002:112) ” Meningkatkan mutu pendidikan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.” Oleh karena itu proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, Meningkatkan mutu pendidikan dapat dipandang secara sempit dan luas.

a. Autput Peserta Didik (hasil UAN)

Meningkatkan mutu pendidikan Dewan Pendidikan di wilayah SMPN idealnya bisa meningkatkan peran sertanya dalam menjalankan program-program pendidikan, dalam memediasi masyarakat, sekolah serta pemerintah sehingga apa yang menjadi cita-cita Dewan Pendidikan secara khusus dan pendidikan secara umum dapat dicapai secara gotong royong dengan lembaga pendidikan serta masyarakat/stakeholder pendidikan

Wawancara dengan Bapak SU selaku komisi A DPRD Kabupaten Bahwa, “lulusan pendidikan di Kabupaten Bantaeng ini bisa di bilang sangat miris, karena bantaeng berada pada urutan 23 se indonesia, Bantaeng di sejajarkan dengan NTT dan bagian timur lainnya” (wawancara tanggal 22 November 2017)

Hal berbeda diungkapkan oleh kepala sekolah SMPN 1 tompobulu bahwa “lulusan kai itu rata-rata mempunyai kualitas dan kapabilitas yang bagus” (wawancara tangga 19 Noveember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peningkatan mutu dalam hal ini output peserta didik baik, namun tidak ada campur tangan daripada Dewan Pendidikan.

b. Kualitas Alumni

Alumni pun menjadi tolak ukur peningkatan mutu pendidikan yang ada di ssekolah, hal tersebut sangat berperan untuk mendukung dan mengkapmapnykan sekolah keluar, agat membangun citra organissi yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan bapak JU selaki ketua Komite sekolah SMPN

1 Tompobulu bahwa :

lulusan-lulusan SMPN tompobulu itu rata-rata berkualitas, bisa dilihat mereka banyak menempati posisi strategis di pemerintahan, kepala sekolah di Desa Labbo itu dulu saya yang ajar di SMPN 1 Tompobulu itu, kemudian beberapa sudah jadi dosen, masih banyak lagi (wawancara tanggal 20 November 2017)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak KA selaku kepala sekolah SMPN 1

Tompobulu bahwa

Dewan Pendidikan dalm hal memberi masukan. Kalau sekolah ini belum pernah, cuman ada pertemuan di kabupaten, sperti PGRI,. Misalkan menangani siswa, menggunakan dana, peningkatan kompetensi kepsk dan guru tata usaha, termasuk juga peningkatan sapras. Bentuknya seperti keamana pagar, kebersihan t4 sampah sanitasi WC dsb, termasuk Meningkatkan mutu pendidikan karakter siswa ada masjid. Pada sisi Program kerja sekolah Dewan Pendidikan apakah memberi saran atau masukan itu secara khusus belum, karena memberi secara umum sperti pertemuan saja. Apalagi rata-rata mereka sudah sepuh, atau tua. Terkait 8 SNP secara umum saja, seperti SKL kemudian ada sapras proses penilaian pembiayaan dan penilaian. Cuman secara umum. SKL memberi masukan supaya diadakan pengayaan, ada peningkjatan mutu, selain itu supaya membeli buku bermutu. Hubungan Sekolah dan masyarakat bagus,

karena skitar sini, memberikan saran untuk rehab sekolah, bentuknya biasa kami adakan sosialisasi dalam rangka anak-anak mau ujian. Dalam rangka penerimaan beasiswa kami undang orang tua untuk datang, apakah itu pakaian, transportasi dan buku. Lagi-lagi Dewan Pendidikan hanya memberikan gambaran secara umum saja, seperti contoh, biasa terjadi anak-anak yang bolos, kami panggil ortunya untuk datang bagaimana solusi terbaiknya.

Kemudian penjelasan dari Bapak AG selaku kepala sekolah SMPN 1

Pa'jukukang bahwa:

Dewan pendidikan itu di tiap-tiap Kabupaten adalah mitra keraja dinas pendidikan dan fungsinya adalah memberikan masukan dan saran tentang kebijakan yang harus diambil oleh dinas pendidikan yang terkait pengembangan pendidikan, hanya ketika berbicara Dewan Pendidikan bermitra di induk, turunannya Dewan Pendidikan adalah komite sekolah. Tetapi Dewan Pendidikan kadang-kadang jalan ke sekolah-sekolah melihat perkembangan sekolah, bagaimana kebijannya terhadap sekolah. Di dalam penyusunan RKAS, selalu kita melihat apa kebijakan dinas pendidikan, Dewan Pendidikan itu kalo di pemerintahan ada DPRD mitra kerja, kalau kita Dewan Pendidikan, selama ini yang saya tau itu, selama saya jadi kepek disini saya belum pernah komunikasi di sekolah, pernah turun 1 kali, menanyakan langsung, bagaimana kondisi sekolah, bagaimana tentang pengembangan sekolah. Dan dinas pendidikan ke bawah. Dewan Pendidikan mengontrol kebijakan dan sekaligus penerima informasi dari bawah kemudian memberikan masukan-masukan atau saran terkait pengembangan sekolah. Belum ada pertemuan dengan kepala sekolah sejauh ini. Biasa hanya membincungkan bagaimana komite sekolah itu sendiri. Semenjak ada kucuran dana BOS, hampir fakum komite sekolah. Dewan Pendidikan selalu mengadakan pertemuan itu dengan tokoh agama dan lain-lain, dalam rangka membantu sekolah, walaupun sekolah tidak dilibatkan langsung. Biasa memberikan motivasi kepada masyarakat, bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi masyarakat juga. Peran dewan pendidikan. Dewan Pendidikan itu

harus nampak peran sertanya, apa sesungguhnya masukannya apa yang harus dilakukan dinas pendidikan, sehingga jangan asal nama saja.

Kemudian penjelasan dari Bapak SA selaku Kepala Sekolah di SMPN 1

Bantaeng bahwa :

Sinergi sekolah dengan Dewan Pendidikan baik, biasanya turun ke sekolah-sekolah kadang kalo ada sesuatu, kalau tidak ada aman-aman saja. Program kerja dan dewan pendidikan tidak sampai kesana, keberadaan dewan pendidikan sebenarnya lembaga mandiri yang langsung ke dinas tidak langsung ke satuan pendidikan. Misalnya ada keributan di sekolah maka Dewan Pendidikan mengkoscek. dua tahun selama menjabat, kontak tidak pernah, tapi jalan-jalan pernah, membicarakan tentang penerimaan siswa baru. Kriteria tenaga kependidikan, dewan pendidikan tidak langsung ke sekolah pendidik dan tenaga kependidikan yang memberi pertimbangan adalah dinas pendidikan. Sekolah kan bagiannya dinas, sehingga sekolah tidak bisa menentukan sendiri. Instansi pemerintah langsung di dinas. mutu pendidikan sekolah akhir-akhir ini yang saya ketahui belum ada pengaruh yang dibawah oleh Dewan Pendidikan. (wawancara 18 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa kepala sekolah SMPN di kabupaten Bantaeng, Kepala Sekolah yang diwawancarai merupakan saran dari Dinas Pendidikan setelah menganalisis dan dari latar belakang yang diberikan peneliti. Wawancara kepala sekolah di atas menunjukkan Dewan Pendidikan yang aktif sebagai lembaga mandiri dan Meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan berbasis kebutuhan sekolah, jika ada masalah urgen maka Dewan Pendidikan turun langsung, atau pihak sekolah lah yang berkunjung ke sekretariat Dewan Pendidikan, jadi kesimpulannya adalah dalam hal Meningkatkan mutu pendidikan Dewan Pendidikan belum maksimal. Hal tersebut dilatar belakangi juga

dengan vakumnya Dewan Pendidikan akibat dari belum menyusun program kerja selama kepengurusan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Peran Dewan Pendidikan merupakan sumbangan baik materi maupun non materi yang diberikan kepada Pendidikan. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri menjadi tantangan tersendiri untuk memberikan sumbangansi peran pada pendidikan di tingkat daerah. Selain itu Dewan Pendidikan hanya memiliki garis koordinatif kepada Bupati, Dinas Pendidikan dan Komisi A DPRD, artinya tidak ada jalur khusus untuk diberikan secara penuh apa yang telah disarankan oleh Dewan Pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Dewan Pendidikan menjelaskan bahwa peran Dewan Pendidikan sejauh ini belum maksimal, hal tersebut karena faktor internal Dewan Pendidikan itu sendiri yang perlu adanya rekomposisi pengurus untuk regenerasi semangat baru, juga faktor eksternal yang menjadi tantangan bagi Dewan Pendidikan untuk melancarkan komunikasi kepada pihak-pihak yang berstatus sebagai lembaga koordinasi, tapi hal tersebut tidak menjadi masalah untuk meredupkan Dewan Pendidikan. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh Dewan Pendidikan bahwa kami masih memegang prinsip *voulater* atau prinsip kesukarelaan, di mana yang artinya Dewan Pendidikan bukan lembaga yang memperoleh gaji serta hal-hal material lain, dari prinsip kesukarelaannya menjadi marwah bagi Dewan Pendidikan untuk bertahan sampai pada hari ini.

Peran Dewan Pendidikan bisa dilihat dari pemaparan hasil peran Dewan Pendidikan seperti apa, pada wawancara sebelumnya Dewan Pendidikan kurang berperan, serta peran hingga saat ini belum maksimal diberikan terhadap Meningkatkan mutu pendidikan di SMPN khususnya di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka secara deskriptif dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bantaeng mengandung beberapa komponen yang perlu dimiliki antara lain: peran Dewan Pendidikan sebagai pemberi pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai pengontrol, dan sebagai mediator, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa:

1. Peran Dewan Pendidikan sebagai pemberi pertimbangan

Sebagai pemberi pertimbangan secara umum Dewan Pendidikan sebagai mitra yang sangat berpengaruh kedudukannya dalam pengelolaan pendidikan yakni untuk meningkatkan efisiensi, kualitas dan pemerataan pendidikan. Selain itu juga Dewan Pendidikan mempertimbangkan program-program yang akan dijalankan di Sekolah yakni dengan cara mengadakan pertemuan ataupun rapat dengan masyarakat dan sekolah.

Berdasarkan wawancara dilapangan bahwa tidak semua program-program yang ada di sekolah-sekolah atau komite sekolah menjadi perhatian oleh Dewan Pendidikan sebab sudah ada peraturan yang kompleks oleh Dinas Pendidikan dalam mengelola program sekolah, dan sekolah secara pribadi mengelola sekolahnya sesuai

kemampuan dan potensi sekolah. Hal senada diungkapkan oleh ketua Dewan Pendidikan bahwa dalam hal Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan dalam program –program, kriteria tenaga kependidikan, kriteria sarana dan prasarana serta kesiswaan Dewan Pendidikan memposisikan diri sebaga organisasi yang sifatnya voelonter, atau sukarela, dimana kami hanya memeberikan peran serta kepada Dinas Pendidikan atau Komite-komite sekolah, atau setiap kepala sekolah. Namun, hal tersebut dua tahun terakhir ini intensitas kerja kami nyaris tidak ada, jadi dalam hal memberikan pertimbangan Dewan Pendidikan kurang berperan.

2. Peran Dewan Pendidikan sebagai pendukung

Sebagai pendukung Dewan Pendidikan harus benar-benar memantau kondisi yang harus dibenahi di sekolah tersebut. Melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait maka akan mendapatkan gambaran untuk mengatasi hal-hal tersebut, sebab ini penting karena akan memberikan perubahan terhadap sekolah tersebut. Menurut Purwanto (1998) pendukung adalah kesedian atau kecendrungan seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu, apabila kelompok tersebut mendapat rangsangan. Sikap pendukung dapat terjadi pada situasi tertentu, orang, kelompok, nilai-nilai terjadi di sekitar manusia.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa Dewan Pendidikan sebagai pendukung dalam hal mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat, serta mendorong tumbuhnya perhatian dan komitemen masyarakat merupakan serangkaian kegiatan dan indikator yang berkesinambungan satu sama lain. Dewan Pendidikan sejauh ini hanya mengamati

masyarakat bagaimana afenomena yang terjadi dan menyarankan kepada pemerintah agar bagaimana paradigma masyarakat terhadap pendidikan bisa berubah dengan baik.namun, sejauh ini Dewan Pendidikan perannya sebagai pendukung belum maksimal, dan tidak ada program kerja selama dua tahun terakhir kepengurusan.

3. Peran Dewan Pendidikan sebagai pengontrol

Siagian (2000) mendefinisikan pengawasan/kontrol sebagai keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionaliasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik, dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin.

Bedasarkan hasil temuan lapangan bahwa Dewan Pendidikan sebagai pengontrol menurut anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantaeng, Dewan Pendidikan kurang bersinergi dengan DPRD masalah pengawasan atau hasil dari kinerja atau program-program yang telah dijalankan, seperti evaluasi kebijakan, evaluasi program dan bagaimana keluaran pendidikan. Bisa dilihat dari tingkat lulusan kabupaten Bantaeng, dan hasil uji kompetensi pendidik di Kabupaten Bantaeng sangat jauh dari standar. Berdasarkan pemaparan ketua Dewan Pendidikan juga bahwa dari awal memang tidak ada rencana program kerja Dewan Pendidikan, kami hanya terjun jika ada masalah yang urgrm saja. Dengan demikian peran Dewan Pendidikan pada perannya sebagai pengontrol belum maksimal sampai saat ini.

4. Peran Dewan Pendidikan sebagai medoator

Dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 disebutkan bahwa Dewan Pendidikan berperan sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di Kabupaten/Kota. Peran sebagai mediator dijabarkan kedalam fungsi Dewan Pendidikan sebagai berikut: melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisis ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapatkkn bahwa Dewan Pendidikan belum berperan dalam hal tersebut sebab, dewan pendidikan nyaris fakum dalam mengurus Dewan Pendidikan selama beberapa tahun kepengurusannya.

5. Mutu pendidikan di SMPN di Kabupaten Bantaeng

Meningktakan mutu pendidikan adalah: usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Meningkatkan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Meningkatkan mutu pendidikan jika dikaitkan dengan pengembangan manusia merupakan bagian dari pendidikan, pelaksanaan Meningkatkan mutu pendidikan adanya dari sisi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Meningkatkan mutu pendidikan merupakan penataan kembali hal-hal yang pernah dipelajari untuk membangun dan memantapkan diri dalam rangka menjadi lebih baik.

a. Keluaran Peserta Didik (Hasil UAN)

Mutu pendidikan dilihat dari sisi aotput satuan pendidikan maka ssekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Bantaeng rata-ratamemiliki aoutput yang bagus, namun disayangkan karena penelitian ini variabel utama adalah Dewan Pendiidakn, tapi Dewan Pendidikan dewasa ini tidak aktif lagi, sehingga berpengaruh pada perbincangan mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan.

Informasi terkait yang didapatkan pada masalah Meningkatkan mutu pendidikan SMPN maka peneliti meminta petunjuk dinas pendidikan bagian kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMPN untuk memilih SMPN mana yang harusnya menjadi sasaran menggali informasi terkait dengan Meningkatkan mutu pendidikan Dewan Pendidikan itu sendiri. Maka dipilihlah tiga sekolah perwakilan sebagai sasaran menggali informasi yaitu : (1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bantaeng, sebagai sekolah favorit di Kabupaten Bantaeng, selain favorit sekolah ini juga punya akreditasi paling tinggi diantara sekolah lain. (2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pa'jukukang, sebagai sekolah tingkat akreditasi menengah yang ada di Kabupaten Bantaeng. (3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tompobulu, sebagai perwakilan dari sekolah dengan tingkat rendah.

Berdasarkan hasil wawancara oleh perwakilan setiap kepala sekolah di Kabupaten Bantaeng bahwa, Dewan Pendidikan dalam konteks menjalankan peran Dewan Pendidikakn untuk meningkatkan mutu pendidikan belum maksimal. Dewan Pendidikan hanya memberikan saran pada saat *urgent* dan kepala sekolah sendiri yang berkunjung ke sekretariat Dewan Pendidikan.

b. Kualitas Alumni

Banyak alumni yang menunjukkan proesifitasnya dalam mengarungi dunia pendidikan, dipandang secara khusus pada persoalan alumni yang ada di SMPN di Kabupaten Bantaeng, terkhusus pada SMPN 1 Pa'jukukang, SMPN 1 Bantaeng, SMPN 1 Tompobulu. Tapi, Dewan Pendidikan tidak menjemput hal tersebut sehingga mutu pendidikan dalam sinergitas pendidikas sangatlah kurang.

Meningktakan mutu pendidikan akan maksimal jika internal Dewan Pendidikan saling bekerja sama atau kolektif kolegial dalam memandang pendidikan, serta progresif dalam merespon dan menindaklanjuti masalah pendidikan untuk kemudian di berikan ke Dinas Pendidikan atau komisi A DPRD itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan temuan lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng belum maksimal dibuktikan dengan:

- a. Dewan Pendidikan sebagai badan pertimbangan, tidak melaksanakan fungsinya sebagai badan pertimbangan.
- b. Dewan Pendidikan sebagai Penghubung, peran yang dijalankan tidak dilaksanakan dengan baik
- c. Peran Dewan Pendidikan sebagai pengontrol, tidak dilaksanakan dengan baik
- d. Peran Dewan Pendidikan sebagai mediator, tidak terlaksana

B. saran

1. Dewan Pendidikan hendaknya bisa memaksimalkan kerjanya beserta pengurus dan jajarannya. Mengkomunikasikan setiap masalah dalam musyawarah untuk mencari jalan atau cara dalam menghadapi masalah pendidikan yang ada di tingkat Kabupaten.
2. Komite Sekolah hendaknya rekomendasi kepada Dewan Pendidikan untuk lebih progresif.
3. Kepala Sekolah hendaknya memperhatikan komite yang ada disekolahnya.

4. Penyatuan persepsi, Dewan Pendidikan dapat bersinergi dengan pemerintah, serta menyarankan untuk rekomposisi pengurus Dewan Pendidikan. Membangun sinergitas sangat penting sehingga: (1) adanya pemahaman yang sama antara pihak pemerintah, komite sekolah, kepala sekolah, dan masyarakat dalam perannya untuk membina SMPN di Kabupaten Bantaeng (2) untuk membangun pemahaman yang sama antara pihak Dinas Pendidikan, DPRD komisi A serta kepada komite-komite sekolah salah satunya dengan adanya komunikasi berkelanjutan. (3) membangun semangat kebersamaan akan menjadi modal penting, artinya tanggung jawab akan lebih ringan dengan adanya saling memahami dan semangat kebersamaan akan terbangun.
5. Kepada peneliti yang lain yang berminat meneliti hal yang sama atau mengangkat dan mengembangkan penelitian ini agar memahami bagaimana Dewan Pendidikan peran dan fungsinya serta keberadaannya dalam dunia pendidikan.

Daftar Pustaka

- Anne Ahira. *Terminologi Kosa Kata*. 2012. Bumi Aksara. Jakarta
- Anwar, M I. 2013. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. PT Rajagrafindo Persada. Depok
- Arikunto Suharsimi. 2014. *Penelitian Tindakan Sekolah*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Azam. 2014. *Peran peran komite sekolah sebagai badan pendukung terhadap manajemen mutu pendidikan di SMK Negeri Se-Kota Bandung*. (Online).(<http://adpend.upi.edu/index.php/2012-02-08-14-25-26/jurnal-s1-adpend/54-jurnal-wisuda-desember--2014/172-peran-peran-komite-sekolah-sebagai-badan-pendukung-terhadap-manajemen-mutu-pejdidikan-di-smk-negeri-se-Kota-bandung>).(diakses tgl 11-7-2017)
- Danim Sudarwan. 2010. *Otonomi Manajemen Sekolah*. Alfabeta. Bandung
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Fasli, Jalal & Dedi, Supriyadi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan*. Rajawali Pers
- Irianto Y B. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan Konsep, Teori, dan Model*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- JuniPriansa Donni. 2014. *Kinerja dan Profesionalisme Guru*. Alfabeta. Bandung
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan*. Depdiknas. Jakarta
- Kompri.2014. *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*. Alfabeta. Bandung
- Maisah. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Gaung Persada Pers Group. Ciputat

- Moleong, Lexy. J. 1991. *Metedeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Rosda. Bandung
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Balai Pustaka. Jakarta
- Rahman Abdul. 2014. *Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Rohiat. 2012. *Manajemen Sekolah Teori dan Praktik*. Reflika Aditama. Bandung
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Suhartono. Suparlan. 2011. *Pemberdayaan Pendidikan Sekolah Suatu Pendekatan Administrasi Ppendidikan*. Badan Penerbit UNM. Makassar
- Suharsaputra U. 2013. *Adiminstrasi Pendidikan*. PT Refika Adifarma. Bandung
- Uno H B. 2010. *Profesi Kependidikan*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*

L

A

M

P

I

R

A

N

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

VARIABEL	INDIKATOR	DESKRIBTOR	SUMBER
Peran Dewan Pendidikan Kab. /Kota	1. Peran Dewan Pendidikan sebagai pemberi pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan program pendidikan • Rencana dan anggaran pendidikan dan belanja sekolah • Kriteria tenaga kependidikan • Kriteria fasilitas pendidikan, dan • Hal yang terkait dengan pendidikan 	Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, Kepala Sekolah
	2. Peran Dewan Pendidikan sebagai pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan • Menggalang dana masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan • Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan 	Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, Komite Sekolah
	3. Peran Dewan Pendidikan sebagai pengontrol	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sekolah 	Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, Komisi D DPRD bagian Pendidikan
	4. Peran Dewan Pendidikan sebagai medoator	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerja sama dengan stakeholder atau masyarakat • Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat 	Dewan Pendidikan, Komisi D DPRD bagian Pendidikan
Mutu Pendidikan	1. Output satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil UAN • Kualitas Alumni 	Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Komisi A DPRD

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Dewan Pendidikan)

Biodata Informan

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan Struktural :

Waktu wawancara : tgl.....Pukul.....

A. Peran Dewan Pendidikan sebagai Pemberi Pertimbangan

1. Peran-peran apa saja yang telah dijalankan oleh Dewan Pendidikan sebagai Pemberi Pertimbangan, dan apakah Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan terhadap program tersebut?
2. Apakah Dewan Pendidikan Kab./Kota memberikan pertimbangan terhadap RAPBS?
3. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap kriteria tenaga kependidikan di sekolah?
4. Bagaimanakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap sarana dan prasarana di sekolah?
5. Apakah Dewan Pendidikan memberikan terhadap kurangnya guru di Sekolah?
6. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap anggaran yang ada?
7. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap peserta didik mulai dari penerimaan sampai dengan pengelolaannya.

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Dewan Pendidikan)

Biodata Informan

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan Struktural :

Waktu wawancara : tgl.....Pukul.....

B. Peran Dewan Pendidikan sebagai Pendukung

1. Dalam hal apa saja Dewan Pendidikan mendukung masyarakat dalam meningkatkan pendidikan di sekolah dan dengan cara apa Dewan Pendidikan mendukung hal tersebut?
2. Bagaimana bentuk dukungan Dewan Pendidikan dalam mendukung penggalangan dana masyarakat dalam pendidikan di sekolah?
3. Bagaimanakah bentuk dukungan Dewan Pendidikan Kab/Kota khususnya kebijakan-kebijakan stakeholder

C. Peran Dewan Pendidikan Sebagai pengontrol

1. Program-program apa saja yang selalu dikontrol oleh Dewan Pendidikan Kab/kota dan bagaimana cara Dewan Pendidikan mengontrolnya ?

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Dewan Pendidikan)

Biodata Informan

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan Struktural :

Waktu wawancara : tgl.....Pukul.....

D. Peran Dewan Pendidikan Mediator

1. Sebagai mediator, apa saja yang dilakukan Dewan Pendidikan Kab/Kota dengan pihak Komite Sekolah dan masyarakat khususnya dalam meningkatkan mutu sekolah ?
2. Bagaimanakah Dewan Pendidikan Kab/Kota mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk sekolah tersebut ?
3. Bagaimanakah bentuk dukungan Dewan Pendidikan Kab/Kota khususnya kebijakan-kebijakan stakeholder

E. Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

1. Usaha apa saja yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan ?
2. Sejauh pengetahuan bapak, apakah Dewan Pendidikan memberikan pengaruh terhadap keluaran pendidikan ?

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Komisi A DPRD bagian Pendidikan)

Biodata Informan

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan Struktural :

Waktu wawancara : tgl.....Pukul.....

1. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap program kerja yang dijalankan ?
2. Apakah dewan Pendidikan memerikan sumbangsi ide masukan untuk meningkatkan perhatian masyarakat ?
3. Apakah Dewan Pendidikan mendukung partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan program pendidikan di sekolah?
4. Apakah Dewan Pendidikan mendukung penggalangan dana masyarakat dalam pendidikan dan kebijakan-kebijakan masyarakat ?
5. Apakah Dewan Pendidikan ikut mengontrol proses pembelajaran dan pelayanan yang ada di sekolah ?
6. Sebagai pengontrol, apakah Dewan Pendidikan mengontrol program pendidikan ?
7. Sebagai mediator apakah dewan pendidikan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada DPRD?
8. Bagaimanakah output dari Proses Pendidikan ?
9. Sejauh mana Dewan Pendidikan berpengaruh terhadap mutu Pendidikan ?

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Kepala Dinas Pendidikan)

Biodata Informan

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan Struktural :

Waktu wawancara : tgl.....Pukul.....

1. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap program kerja yang dijalankan ?
2. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap kriteria tenaga kependidikan disekolah?
3. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap sarana dan prasarana di sekolah ?
4. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap kurangnya guru di sekolah?
5. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan tentang anggaran yang ada di sekolah
6. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap pesertra didik mulai dari penerimaan sampai dengan pengelolaannya ?
7. Apakah Dewan Pendidikan mendukung partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan program pendidikan di sekolah?
8. Apakah Dewan Pendidikan mendukung penggalangan dana masyarakat dalam pendidikan dan kebijakan-kebijakan masyarakat ?
9. Apakah Dewan Pendidikan ikut mengontrol proses pembelajaran dan pelayanan yang ada di sekolah ?

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Kepala Sekolah)

Biodata Informan

Nama :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan Struktural :
 Waktu wawancara : tgl.....Pukul.....

1. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap program kerja yang dijalankan ?
2. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap kriteria tenaga kependidikan disekolah?
3. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap sarana dan prasarana di sekolah ?
4. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap kurangnya guru di sekolah?
5. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan tentang anggaran yang ada di sekolah
6. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap pesertra didik mulai dari penerimaan sampai dengan pengelolaannya ?
7. Apakah Dewan Pendidikan mendukung partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan program pendidikan di sekolah?
8. Apakah Dewan Pendidikan mendukung penggalangan dana masyarakat dalam pendidikan dan kebijakan-kebijakan masyarakat ?
9. Apakah Dewan Pendidikan ikut mengontrol proses pembelajaran dan pelayanan yang ada di sekolah ?
10. Sebagai mediator apakah dewan pendidikan selalu mengadakan rapat dengan pihak sekolah dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sekolah?
11. Bagaimana presentase kelulusan di sekolah bapak?
12. Bagaimana kontribusi alumni dari sekolah bapak ?

PEDOMAN WAWANCARA

(Komite Sekolah)

Biodata Informan

Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Struktural :
Waktu wawancara : tgl.....Pukul.....

1. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap program kerja yang dijalankan ?
2. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap kriteria tenaga kependidikan disekolah?
3. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap sarana dan prasarana di sekolah ?
4. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap kurangnya guru di sekolah?
5. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan tentang anggaran yang ada di sekolah
6. Apakah Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan terhadap pesertra didik mulai dari penerimaan sampai dengan pengelolaannya ?
7. Apakah Dewan Pendidikan mendukung partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan program pendidikan di sekolah?
8. Apakah Dewan Pendidikan mendukung penggalangan dana masyarakat dalam pendidikan dan kebijakan-kebijakan masyarakat ?
9. Apakah Dewan Pendidikan ikut mengontrol proses pembelajaran dan pelayanan yang ada di sekolah ?
10. Sebagai mediator apakah dewan pendidikan selalu mengadakan rapat dengan pihak sekolah dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sekolah

Hasil Wawancara

Dimensi	Inisial/Tanggal Wawancara	Jawaban atau pernyataan Informan
1. Peran Dewan Pendidikan sebagai Pemberi Pertimbangan	2. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng 16/11/2017	<p>Dewan Pendidikan sebagai peran serta, tidak menginterpendensi kebijakan apa yang harus diambil, melainkan Dewan Pendidikan hanya sebatas memberi saran dalam pertimbangan-pertimbangan beberapa hal, seperti kriteria pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan sekolah dan menuangkan masalah kesiswaan. Mengenai RAPBS, sebenarnya dalam penyusunan RAPBS para kepala sekolah seabiknya mengikutkan komite sekolah, cuma apakah itu dilaksanakan atau tidak tapi dewan pendidikan tidak pernah dilibatkan persoalan keuangan. Lagi-lagi Dewan Pendidikan hanya peran serta dan sejauh ini Dewan Pendidikan belum pernah dilibatkan dalam perencanaan keuangan sekolah apapun. Pernah dewan pendidikan memberikan peta, jumlah guru yang mengajar di daerah dan kota, dan Mayoritas guru adalah wanita. Suami kerja di kota. Suami di kota istri kerja di desa. Bagaiman aspaya guru di dekatkan antara rumah dan tempat mengajarnya. Dewan Pendidikan sudah berikan gambaran masalah tersebut. Tapi pemerintah berat juga untuk mengaplikasikan, bahkan sampai sekarang. Sarana prasarana. Dewan pendidikan tidak terlalu ikut memberikan pertimbangan, karena di sekolah sudah ada aturannya. Dewan pendidikan tidak terlalu banyak mencapuri urusan fasilitas pendidikan. Dan juga komite sekolah sekarang bukan lagi pada esensinya, dilihat dari pengadaan sarana maupun prasarana sekolah maka sekolah ataupun yang akan memberikan fasilitas melihat siapa komite sekolahnya</p>

	3. Ibu AY 17/11/2017	Dinas Pendidikan secara khusus belum pernah berkonsultasi masalah RAPBS kepada Dewan Pendidikan, selama saya menjabat di Kasi Kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMP sejauh ini belum. saprass, pemenuhan 8 standar nasional sudah ada hanya dalam bentuk surat keputusan. Mengenai hal tersebut Dewan Pendidikan itu belum sama sekali memberikan pertimbangan pada bagian sarana dan prasarana pendidikan, tetapi dalam rangka pemenuhan, kegiatan pelaksanaan kurikulum 13 pemenuhan 8 standar harus dilaksanakan pada satuan pendidikan.
	4. Bapak SA 18/11/2017	Dewan Pendidikan seyogyanya memang tidak boleh menginterupsi program kerja, kebijakan serta kriteria-kriteria yang berkaitan dengan pengembangan 8 standar, sekolah kami banyak berkonsultasi dengan dinas pendidikan terkait hal tersebut. Dewan Pendidikan sejauh ini belum pernah memberikan pertimbangan terkait dengan kriteria tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan kan masuk dalam 8 standar dan 8 standar adakah campur tangan, jadi 8 standar itu ada sektornya dinas pendidikan, ada juga sekolah, tentang standar ketenagaan kewenangannya pemerintah daerah, kemudian sapsras, itu ada di sekolah.
	Bapak AG 18/11/2017	Dewan Pendidikan dalam memberikan pertimbangan sejauh yang kami ketahui bahwa Dewan Pendidikan belum pernah terjun langsung ke SMPN secara khusus, hanya jika ada pertemuan yang kami tidak ketahui dengan komite sekolah. Yang jelas Dewan Pendidikan secara teknis bersentuhan dengan Dinas Pendidikan secara langsung, barulah kemudian Dinas yang memberikan saran dan perintah ke sekolah-sekolah
	Bapak KA 18/11/2017	sejauh yang saya ketahui kita pernah diundang dalam suatu pertemuan dan yang

		hadir sebagai penasehat adalah Dewan Pendidikan, beliau menjelaskan dan memetakan tenaga pendidik dan kependidikan. Tapi sejauh ini belum ada aplikasi dari pemerintah, pertemuan tersebut sudah lama, sejak dua tahun terakhir ini
	Ketua Komite Sekolah SMPN 1 Pajukukang 18/11/2017	saya sebagai komite sekolah SMPN 1 Pajukukang belum pernah berkonsultasi langsung masalah tersebut. Semoga kedepannya ada perubahan untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng karena pendidikan sangat penting untuk masa depan bangsa
	Ketua Komite sekolah SMPN 1 Tompobulu 18/11/2017	Komite sekolah dan RAPBS hubungannya tidak terlalu menyoroti, kami hanya diundang pada saat rapat-rapat penerimaan siswa baru, masalah RAPBS belum. Dewan Pendidikan dan komite sekolah kami jarang berkonsultasi masalah RAPBS tersebut. RAPBS sepenuhnya ditangani oleh sekolah, kami tidak menginterpendensi pendanaan sekolah
Peran Pendidikan pendukung	Dewan seagai Ketua Dewan Pendidikan 16/11/17	Dewan Pendidikan dan masyarakat, banyaknya anak-anak putus sekolah karena faktor ekonomi, kenapa bisa ekonomi sedangkan pemerintah menyediakan wadah. Kalau SMP tidak banyak persoalan. Paradigma masyarakat terhadap pendidikan masih perlu diubah. Pengendalian sekolah setelah sudah terbagi, sewaktu waktu berkonsultasi dengan dinas pendidikan untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah, apalagi sekarang pemerintah banyak melakukan pelatihan-pelatihan, ikut serta biasanya kami hanya narasumber. Tugas berat dari pada kepala sekolah adalah mengubah paradigma masyarakat yang menganggap bahwa jika anak-anak sudah di sekolah orang tua tidak terlalu bertanggung jawab lagi. Bagaimana cara pandang sekolah dan dirumah. Biasa mereka hanya bilang <i>apaji na ajaranko gurunnu</i> . Dewan pendidikan menyarankan agar bisa

		<p>mengatasi hal tersebut. Pendidikan adalah proses dan masalah yang berkepanjangan. Apa yang disebut masalah, adalah jarak keinginan dan fakta, orang bergerak didunia pendidikan tidak pernah berhenti untuk menangani hal tersebut.</p> <p>Masalah galang dana, Dewan Pendidikan terbuka dikalangan masyarakat, selain itu masyarakat sekitar belum pahan esensi dari keberadaan Dewan Pendidikan. tapi kelemahannya masyarakat berpikir semua sudah di tanggung pemerinah. Undang-undang sudah mengatur sedemikian rupertentang pendanaan bagaimana. Untuk itu paradigma masyarakat masalah galang dana tidak terlalu diperhatikan, dan kami sebagai Dewan Pendidikan pun belum pernah mengadakan hal semcam itu</p>
	Ibu AY 17/11/2017	<p>memang Dewan Pendidikan tidak memperoleh dana dari pemerintah, namun sejauh ini aktivitas galang dana yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan belum ada dan nampak, juga program-programnya belum terlihat sampai sekarang. Dewan Pendidikan belum pernah mengadakan sosialisasi terkait dengan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, kenapa karena memang selama dua tahun terakhir ini sejak saya pindah di kasi kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMP belum ada kontak dengan bapak dewan pendidikan</p>
	Bapak SA 18/11/2017	<p>kedekatan sekolah dan masyarakat intensitasnya tidak begitu terjalin, terkait dengan kegiatan Dewan Pendidikan dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan sejauh ini kami di sekolah belum dapat informasi terkait hal tersebut, komite sekolah pun tidak, bukan tidak tapi belum menginfokan sekaitan hal tersebut.</p>
	Bapak AG 18/11/2017	<p>Hubungan sekolah dan masyarakat. Pertemuan yang dilakukan adalah sebatas menyampaikan orientasi seputar siswa baru,</p>

		<p>pertukaran sekolah, tetap kita berhubungan dengan masyarakat dan orang tua siswa. Perhatian masyarakat dan sekolah masih bagus. Dewan Pendidikan selalu mengadakan pertemuan itu dengan tokoh agama tokoh pemuda dan lain sebagainya, dalam rangka membantu sekolah, walaupun sekolah tidak dilibatkan langsung. Biasa memberikan motivasi kepada masyarakat, bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi masyarakat juga</p>
	Bapak KA 18/11/2017	<p>Sekolah dan masyarakat bagus, karena skitar sini, memberikan saran untuk rehab sekolah, bentuknya biasa kami adakan sosialisasi dalam rangka anak-anak mau ujian. Dalam rangka penerimaan beasiswa kami undang orang tua untuk datang, apakah itu pakaian, transport dan buku tapi sejauh ini Dewan Pendidikan belum pernah datang ke sekolah secara langsung. Tapi masyarakat dan sekolah hubungannya bagus</p>
	Ketua Komite Sekolah SMPN 1 Tompobulu SY 21/11/2017	<p>masalah galang dana Dewan Pendidikan dan komite sekolah sejauh ini kami belum mengetahui bagaimana prosesnya, dan juga belum ada sosialisasi terkait hal tersebut</p>
Peran Dewan Pendidikan sebagai pengontrol	Ketua Dewan Pendidikan Bapak AK 16/11/2017	<p>masalah evaluasi pengawasan kebijakan, belum pernah dilakukan oleh Dewan Pendidikan itu sendiri, dikarenakan karena situasi Dewan Pendidikan yang tidak lagi mendukung</p>
	Komisi A DPRD Bapak SU 22/11/2017	<p>Dewan Pendidikan sejauh ini belum pernah melakukan evaluasi selama saya ada di Komisi A ini, dan ini juga sangat penting karena akhir-akhir ini pendidikan di Bantaeng mengalami kemunduran, salah satu indikator, hasil uji kompetensi guru di bawah standar provinsi dan pusat. Kemudian urutan pendidikan berada pada tingkat 23 se sul sel dan pendidikan Bantaeng di sejajarkan dengan NTT dan NTB. Program yang ditawarkan dunia pendidikan tidak sinkron</p>
	Kepala Kasi	<p>memang selama ini belum pernah dilakukan oleh Dewan Pendidikan, selama</p>

		Kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMP Ibu AY 17/11/2017	saya menjabat sebagai kepala sekolah disini, selama dua tahun, intensitas kegiatan dewan pendidikan belum pernah saya mendapatkan hal tersebut. Kalaupun ada evaluasi program yang dilakukan dengan komite sekolah, sejauh ini kami belum pernah melihatnya.
Peran Dewan Pendidikan sebagai Mediator	Dewan Pendidikan sebagai Mediator	Ketua Dewan Pendidikan sebagai Mediator 16/11/2017	Masalah kerja sama dengan masyarakat Dewan Pendidikan Kabupaten Bantaeng belum melihat potensi masyarakat untuk diajak bekerja sama, beda dengan daerah lain, seperti dipulau jawa yang notabene adalah pengusaha Dewan Pendidikan disana sangat sejahtera dan banyak melakukan kegiatan, bahkan sesekali mereka mengadakan pameran pendidikan. Kalau Bantaeng ini belum begitu bersinergi dilihat dari potensi masyarakatnya yang belum mempunyai. Biasanya juga ada sengketa, diantara satu orang ke person lain, maka dewan pendidikan menjadi mediasi untuk menangani, di SMPN jarang terjadi masalah. Bagaimana meningkatkan etos kerja Ini sedang didiskusikan dengan dinas pendidikan. Wilayah SMPN, selalu berhubungan denga kepala sekolah, bahasanya lebih tinggi, pemikiran lebih tinggi. Masalah terjadi di SMPN kemungkinan terjadi sangat kecil. Tidak ada tuntutan yang terasa, mereka merasa ada disekianya yang mengntrol. Hal tersebut belum pernah dilakukan, kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat, komite sekolah, serta kepala sekolah terakhir di tahun 2008 lalu. Juga pernah mengadakan pelatihan khusus kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerjanya dan secara kuantitatif hal tersebut berhasil dilihat dari post test dan beberapa laporan dari kepala sekolah. Namun akhir-akhir ini kami sadari bahwa menampung ide tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara struktural belum kami laksanakan, semacam pertemuan dan sebagainya, namun secara kultural, dewan pendidikan

		<p>masih membincngkan persoalan tersebut, dan beberapa pengurus yang ada di kabupaten Bantaeng senantiasa melaporkan bagaimana gejala yang timbul dimasyarakat sekaitan dengan pendidikan khususnya di satuan pendidikan</p>
	<p>Komisi A DPRD Kabupaten Bantaeng 22/11/2017</p>	<p>Ada faktor yang mempengaruhi sehingga kurang sinergi. Saya rasa tidak ada karena kita terbuka, mungkin Dewan Pendidikan tidak terlalu nyambung, beliau juga tidak pernah audience dan kami juga tidak pernah menghadirkan pihak Dewan Pendidikan. Keluaran /outup pendidikan. Salah satu indikator adalah tenaga pendidik. dan peserta didik hasil ujian nasional di SD di seajarkan dengan NTT dan NTB untuk skala kabupaten Bantaeng urutan 23. Hasilnya kan di ukur dari ujian nasional. Aspirasi masyarakt kami pihak DPRD menanggapi. Kmrin banyak aspirasi masyarakat salah satunya anak yang belum mampu melnjutkan pendidikan, dan kami menggelontorkan beasiswa. Bagi siswa yang tidak mampu, dan beasiswa penyelesaian studi. Aspirasi yang kami tampung dan kami anggrkan, pembangunan kemari dari DUK kita bagi secara profesional.kita sudah dorong ke polosok. Kemudian pengadaan bus sekolah. Lalu keberadaan Dewan Pendidikan pada hal tersebut belum nampak karena harus ada lembaga dari luar, memberi masukan agar pendidikan lebih baik, sekarang harus ada rekomposisi/perombakan kepengurusan, di butuhkan orang-orang yang paham tentang pendidikan dan memajukan pendidikan. Kodisi sekarang kan stagnan jalan ditempat. Org kata tertidur. Kita butuh masukan / sumbangsi saran bagi orang-orang berpengalaman. Harus ada rekomposisi</p>

		pengurus, itu saran dari kami.
	Ketua Komite SMPN 1 Tompobulu 21/11/2017	Hubungan sekolah dan masyarakat saya pikir sangat dekat dari apa yang saya amati selama ini keluaran SMPN 1 Tompobulu sangat-sangat berkualitas dan bisa diperhitungkan alumninya. Tetapi yang kami sayangkan selaku komite sekolah hal tersebut tidak terlalu terpublish sampai ke Dewan Pendidikan. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa memang dalam beberapa tahun terakhir ini kami nyaris tidak pernah berkomunikasi dengan Dewan Pendidikan, padahal kami sadari hal tersebut sangatlah penting. Faktor penghambatnya juga mungkin adalah karena kompleksitas aturan pendidikan dari pemerintah pusat, sehingga langkah kami menjadi terbatas walaupun hanya sebagai lembaga mandiri.



Gambar 2.1 Sekretariat Dewan Pendidikan



Gambar 1.3 Wawancara Dengan Dewan Pendidikan 16/11/2017



Gambar 1.4 Wawancara dengan Kepala Kasi Kurikulum dan Meningkatkan mutu pendidikan SMP dinas Pendidikan



Gambar 1.5 Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Pajukukang 18/11/2017



Gambar 1.6 wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Tompobulu



Gambar 1.7 Wawancara Dengan Kepala SMPN 1 Bantaeng



Gambar 1.8 wawancara Dengan Komisi A DPRD Kabupaten Bantaeng



Gambar 1.9 Wawancara Dengan Ketua Komite Sekolah SMPN 1 Tompobulu

RIWAYAT HIDUP



Nur Hajar, lahir pada tanggal 29 Desember 1995 di Kabupaten Bantaeng Dusun Pakku Desa Balumbang Kecamatan Tompobulu.

Nur Hajar adalah anak kedua dari 5 bersaudara, Putri dari pasangan Bapak Bohari dan Ibu Mardiah. Pendidikan yang pernah di tempuh yakni di SDN 58 Balangka'bung pada tahun 2007.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Tompobulu Pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, Selanjutnya penulis melanjutkan di SMKN 1 Bantaeng, Dan tamat pada tahun 2013.. Kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri yakni Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mengambil jurusan Administrasi Pendidikan.